

**PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP
PENGEMBANGAN WISATA ALAM PANTAI
DI KECAMATAN BACUKIKI BARAT
KOTA PAREPARE**

**THE INFLUENCE OF COMMUNITY PARTICIPATION ON
BEACH TOURISM DEVELOPMENT IN WEST BACUKIKI
SUB-DISTRICT, PAREPARE CITY**

MUHAMMAD SETIAWAN AZIS

BOSOWA



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS "45"
MAKASSAR
2009**

**PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP
PENGEMBANGAN WISATA ALAM PANTAI
DI KECAMATAN BACUKIKI BARAT
KOTA PAREPARE**

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Magister

Program Studi

Perencanaan Wilayah dan Kota

BOSOWA

Disusun dan diajukan oleh

MUHAMMAD SETIAWAN AZIS

Kepada

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS "45"
MAKASSAR
2009**

TESIS


**PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP
PENGEMBANGAN WISATA ALAM PANTAI
DI KECAMATAN BACUKIKI BARAT
KOTA PAREPARE**


Disusun dan diajukan oleh

MUHAMMAD SETIAWAN AZIS
Nomor Pokok MPW 4507036

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis
pada tanggal 30 Agustus 2009
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui
Komisi Pembimbing


DR. Ir. Syahriar Tato, MS
Ketua


DR. Ir. Murshal Manaf, MSP
Anggota


**Direktur Program Pascasarjana
Universitas "45"**

**Ketua Program Studi
Perencanaan Wilayah & Kota**


DR. Marwan Mas, SH. MH


Drs. Abd. Azis Mattola MSc

MOTTO :

*Memimpin Diri Sendiri
Sebelum Berhasrat Memimpin Orang Lain
Berfikir ke Masa Depan
Tetapi Tidak Melupakan Masa Lampau "*



Kupersembahkan Kepada :

*Ibu, Ayah, kakak-kakaku,
Istri dan anak-anaku serta
rekan-rekanku yang
senantiasa berdoa dan
menanti keberhasilanku.*

Dan Almamaterku tercinta

Universitas 45



KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Tesis ini tepat pada waktunya dengan segala kemampuan yang penulis miliki.

Tesis ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Pascasarjana Universitas 45. Penulis yakin bahwa Tesis ini masih belum sempurna, untuk itu saran dan kritikan-kritikan yang sifatnya membangun bagi penyempurnaannya sangat penulis harapkan.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu di dalam penulisan Tesis ini. Ucapan terima kasih ini terutama ditujukan kepada :

- Bapak Dr. Marwan Mas, SH, MH, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas 45.
- Bapak Dr. Ir. Syahriar Tato, MS, selaku Dosen Pembimbing I.
- Bapak Dr. Ir. Murshal Manaf, MSP, selaku Dosen Pembimbing II.
- Seluruh Civitas Akademika pada Program Pascasarjana Universitas 45.
- Ketua BAPPEDA Kota Parepare beserta seluruh stafnya.
- Kepala Dinas Pariwisata dan Promosi Daerah Kota Parepare beserta seluruh stafnya.
- Bapak Camat Bacukiki Barat Kota Parepare beserta seluruh stafnya.
- Ayah, Ibu, istri dan anak-anakku serta saudara-saudaraku yang telah memberikan bantuan moral maupun materil.
- Rekan-rekan mahasiswa Pascasarjana Universitas 45 yang telah membantu dalam penyusunan Tesis ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas semua amal dan perbuatannya.

Akhir kata, semoga Tesis ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan semua pihak pada umumnya.



ABSTRAK

Penelitian ini difokuskan pada upaya untuk mengungkapkan sejauhmana pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan program pembangunan pada obyek wisata Alam Pantai di Kecamatan Bacukiki Barat dan bagaimana sikap masyarakat terhadap pembangunan obyek wisata dimaksud. Dalam menjawab pertanyaan ini telah dilakukan suatu analisis dengan beberapa aspek dan pendekatan yang menjelaskan pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pengembangan wisata Alam pantai di Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare.

Pendekatan yang dilakukan dalam menjelaskan tujuan studi ini adalah : pertama; memberikan gambaran dan analisis keadaan obyek wisata daerah dan di Kecamatan Bacukiki Barat dengan mengemukakan data dan informasi yang telah dikumpulkan melalui pengumpulan data sekunder dan primer. Kedua; mengadakan analisis peran partisipasi masyarakat terhadap pembangunan kepariwisataan melalui hasil jawaban pertanyaan-pertanyaan yang disebarakan kepada 150 Orang sebagai responden dan hasil wawancara dengan mereka. Ketiga; adalah mengadakan analisis pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pengembangan wisata alam pantai di Kecamatan Bacukiki melalui metoda analisis Chisquare dan analisis Variance Sederhana.

Dari Analisis yang dilakukan diperoleh hasil bahwa ketergantungan partisipasi masyarakat dengan program pembangunan pariwisata pada obyek wisata ini, adalah "tidak ada" dan pemerintah daerah belum sepenuhnya mendorong motivasi masyarakat untuk berpartisipasi di sektor pariwisata. Selanjutnya pembangunan obyek wisata di Bacukiki Barat belum sepenuhnya melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dalam memberikan saran dan menentukan jenis pembangunan yang diinginkan.

Hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi dasar dalam penetapan kebijaksanaan pembangunan khususnya disektor pariwisata daerah dalam usaha peningkatan pendapatan daerah serta menetapkan sektor pariwisata ini sebagai sektor prioritas dalam pembangunan daerah.

ABSTRACT

This research was focused on the effort to uncover in how far the influence of community participation on implementation of development program and how the society behavior to the Beach Tourism Object development at West Bacukiki Sub-District. To answer the mentioned questions has been made an analyses through several aspects and approaches to explain the influence of the community participation in this respect.

In order to attain the objective of this study, the approach was : firstly; to describe and analyze the existing regional and tourism objects at West Bacukiki Sub-District which are reflected by using data and information are collected. Secondly; to analyze the role of community participation in tourism development by using a measurement of the answer result of questionnaire which has distributed to 150 persons and become respondents at once. Thirdly; to accomplish an analysis of the influences of community participation on tourism development in West Bacukiki sub-District through the Chisquare and Simple Variance Analysis Method.

From the analyses accomplished, it was found in this case that “ there is not dependence of community participation with the tourism development program and also regional government does not fully supported improvement in motivation society to participate in the tourism sector, such as in planning process.

The result of study expected to be a base and support establishment of the regional development policy in order to formulate the regional development policy, especially for tourism sector as a priority and expected sector to increasing regional income and development.

DAFTAR ISI

	halaman
KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian.....	5
1. Manfaat Penelitian.....	5
2. Kegunaan Penelitian.....	6
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Partisipasi Masyarakat.....	7
1. Pengertian Partisipasi Masyarakat.....	7
2. Partisipasi dalam Pembangunan Pariwisata.....	9
B. Pariwisata.....	19
C. Obyek Wisata.....	22
1. Obyek Wisata Alam.....	22
2. Prinsip-prinsip Wisata Alam.....	25
3. Motivasi Pengunjung.....	26
D. Pengembangan Wisata.....	27
E. Implementasi Kebijakan.....	28
1. Pengertian Implementasi Kebijakan.....	28
2. Implementasi Program Pembangunan Pariwisata Alam Pantai.....	30

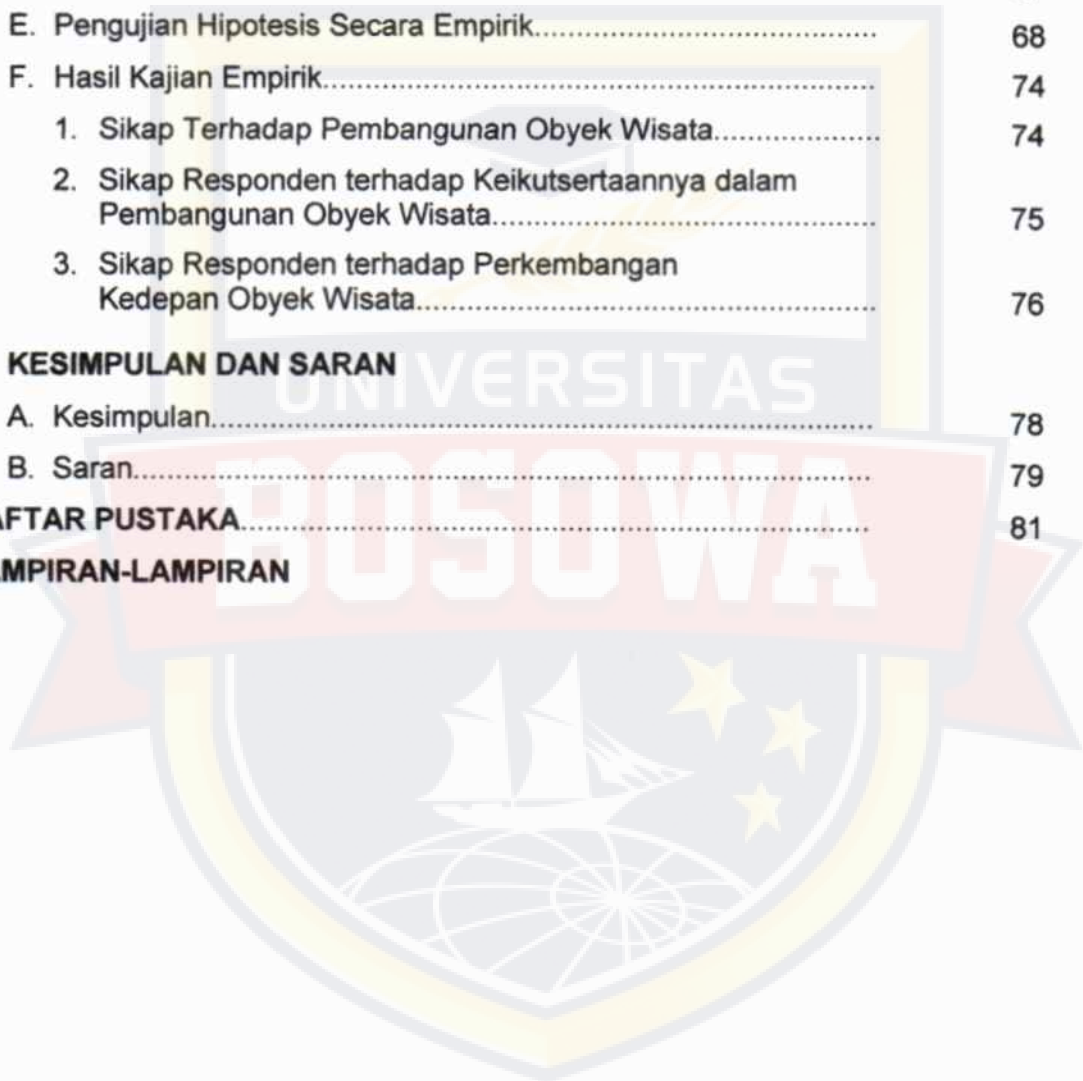
III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Desain Penelitian.....	35
B. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	35
C. Populasi dan Sampel.....	36
1. Populasi.....	36
2. Sampel.....	36
D. Pengumpulan dan Analisa Data.....	38
1. Tehnik Pengumpulan Data.....	38
2. Metode Analisis.....	39
E. Konsep Operasional.....	42
1. Defenisi Konsep.....	42
2. Operasional Variabel.....	43
3. Variabel Penelitian.....	44
4. Kerangka Pikir.....	45

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kota Parepare.....	46
1. Geografi, Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk.....	46
2. Perekonomian.....	49
3. Potensi Pariwisata Kota Parepare.....	49
4. Kebijakan Pengembangan Pariwisata Parepare.....	51
B. Gambaran Umum Kecamatan Bacukiki Barat.....	53
1. Letak dan Luas Wilayah.....	53
2. Topografi.....	55
3. Keadaan Geologi Tanah.....	56
4. Iklim.....	57
5. Hidrologi.....	57
6. Kependudukan.....	58
7. Keadaan Sosial Ekonomi.....	58
8. Sarana Pendidikan.....	60
9. Fasilitas Akomodasi dan Hiburan.....	60

10. Sarana dan Prasarana Wilayah.....	61
C. Deskripsi Lokasi Penelitian Obyek Wisata Alam.....	62
1. Potensi Daya Tarik Wisata Alam Pantai di Kecamatan Bacukiki Barat.....	62
2. Kualitas Lingkungan.....	65
D. Karakteristik Responden.....	67
E. Pengujian Hipotesis Secara Empirik.....	68
F. Hasil Kajian Empirik.....	74
1. Sikap Terhadap Pembangunan Obyek Wisata.....	74
2. Sikap Responden terhadap Keikutsertaannya dalam Pembangunan Obyek Wisata.....	75
3. Sikap Responden terhadap Perkembangan Kedepan Obyek Wisata.....	76
V. KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	81
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
Tabel 3.1	Jumlah Penduduk yang diambil sebagai responden	38
Tabel 3.2	Contoh Hubungan antar dua variabel	40
Tabel 3.3	Operasionalisasi Variabel Penelitian	33
Tabel 4.1	Luas Daerah, Rumah Tangga dan Penduduk tiap Kecamatan di Kota Parepare pada Tahun 2007	41
Tabel 4.2	Dasar Pengembangan Pariwisata menurut Kawasan Pengembangan Obyek Wisata di Kota Parepare	50
Tabel 4.3	Luas, Jarak ke Ibukota Kecamatan dan Kota menurut Kelurahan di Kecamatan Bacukiki Barat	54
Tabel 4.4	Jumlah penduduk Kecamatan Bacukiki Barat tahun 2008	58
Tabel 4.5	Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian	59
Tabel 4.6	Sarana Pendidikan di Kecamatan Bacukiki Barat	60
Tabel 4.7	Jumlah fasilitas akomodasi dan hiburan tahun 2008 Di Kecamatan Bacukiki Barat	61
Tabel 4.8	Identitas Responden berdasarkan Tingkat Pendidikan	67
Tabel 4.9	Responden Berdasarkan Mata Pencaharian	67
Tabel 4.10	Jawaban Responden Terhadap Variabel I dan Variabel II	68
Tabel 4.11	Perhitungan frekuensi berdasarkan test statistic chesquare	70
Tabel 4.12	Perhitungan pengaruh dua variable berdasarkan alat analisis variance sedehana	71

Tabel 4.13	Perhitungan F dari tabel sebelumnya dan hasil perhitungan TBS, BBS dan WBS	72
Tabel 4.14	Sikap Responden terhadap Pembangunan Obyek wisata	75
Tabel 4.15	Sikap Responden terhadap Keikutsertaan dalam Pembangunan Obyek wisata	76
Tabel 4.16	Sikap Responden terhadap Perkembangan Kedepan Obyek wisata	77



DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
1	Harga X^2 sesuai tabel distribusi	41
2	Peta Administrasi Kota Parepare	48
3	Peta Wisata Kota Parepare	51
4	Peta Administrasi Kecamatan Bacukiki Barat	55
5	Peta Topografi Kecamatan Bacukiki Barat	56
6	Potensi Wisata Alam Sungai Karajae	63
7	Potensi Wisata Alam Pantai Lumpue dan Tonrangeng	64
8	Potensi Wisata Alam Pantai Bibir	65
9	Peta Lokasi Penelitian	66

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

- 1 Tabel frekuensi jawaban responden
- 2 Jumlah hasil jawaban responden
- 3 Tabel distribusi pilihan responden menurut nomor urut untuk kategori pembangunan dan partisipasi masyarakat
- 4 Pedoman Wawancara
- 5 Daftar Pertanyaan Responden
- 6 Tabel Distribusi X^2
- 7 Tabel Distribusi F
- 8 Gambar Potensi Obyek Wisata Alam Pantai di Kecamatan Bacukik Barat



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hakekat Pembangunan Nasional adalah Pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Pembangunan manusia Indonesia seutuhnya berarti pembangunan yang dapat menyentuh kebutuhan dari segala aspek kehidupan rakyat baik secara material maupun spritual. Hasil-hasil pembangunan itu perlu harus benar-benar dapat dirasakan serta dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia yang tersebar keseluruh pelosok wilayah Indonesia.

Dalam rangka merealisasikan hakekat pembangunan nasional tersebut, maka pembangunan masyarakat perlu terus ditingkatkan terutama melalui pengembangan kemampuan sumber daya manusia yang dapat mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya gotong royong masyarakat, karena hal tersebut merupakan salah satu komponen yang dominan terhadap keberhasilan pembangunan karena Keberhasilan pembangunan sangat tergantung dari partisipasi masyarakat.

Memperhatikan arti pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dapatlah dikatakan bahwa pelaksanaan pembangunan yang meliputi segala segi kehidupan baru akan berhasil apabila merupakan kegiatan yang melibatkan seluruh anggota masyarakat. Untuk itu partisipasi masyarakat perlu ditumbuhkembangkan secara terus menerus agar dapat memberi dukungan yang maksimal didalam penyelenggaraan pemerintahan.

Kepariwisata bertujuan untuk:

a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi; b. meningkatkan kesejahteraan rakyat; c. menghapus kemiskinan; d. mengatasi pengangguran; e. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya; f. memajukan kebudayaan; g. mengangkat citra bangsa; h. memupuk rasa cinta tanah air; i. memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa; dan j. mempererat persahabatan antarbangsa.

Kesadaran dan peran aktif masyarakat dalam kegiatan pembangunan pariwisata perlu makin ditingkatkan melalui berbagai penyuluhan dan pembinaan yang kegiatannya selain berasal dari pihak pemerintah tentu sangat diharapkan adanya saran dan pendapat dari masyarakat, kemudian pihak pemerintahlah yang akan mengeluarkannya dalam berbagai bentuk kebijakan yang berkaitan langsung dengan masalah pembangunan pariwisata.

Pembangunan pariwisata di kota Parepare , juga tidak terlepas dari adanya keterlibatan/partisipasi masyarakat, walaupun dalam berbagai kegiatannya itu, akan terjadi persentuhan/persinggungan antara budaya setempat dengan budaya yang dibawa oleh para wisatawan domestik maupun mancanegara, namun persentuhan itu diharapkan akan memberikan pengaruh terhadap keinginan masyarakat untuk lebih memperhatikan dan meningkatkan perannya terhadap peningkatan bidang kepariwisataan ini.

Dalam kaitan itu, pemerintah Kota Parepare telah melaksanakan beberapa program dan kegiatan pembangunan kepariwisataan daerah, namun program dari kegiatan-kegiatan yang dialokasikan belum menyentuh langsung secara keseluruhan obyek daya tarik wisata yang ada termasuk obyek wisata alam pantai di Kecamatan Bacukiki Barat. Pembangunan yang dilaksanakan

oleh pemerintah khususnya pemerintah daerah baru pada kegiatan-kegiatan berupa peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pariwisata serta pemeliharaan objek wisata yang mengalami kerusakan. Sehingga dengan demikian, sangat terasa bahwa kebijaksanaan dan program yang telah dirumuskan belum sepenuhnya dilaksanakan sehingga masyarakatpun menilai bahwa pemerintah Kota belum memberikan perhatian yang serius terhadap pengembangan kepariwisataan di kota ini. Akibatnya, partisipasi masyarakat terhadap pembangunan pariwisata pun masih terasa belum terlaksana sesuai dengan yang diharapkan dan pada akhirnya perkembangan pariwisata ini mengalami kelambatan dan belum sepenuhnya dapat diharapkan untuk menjadi sumber pendapatan daerah yang berarti.

Pemerintah menyadari, bahwa masyarakat belum banyak diberi kesempatan untuk ikut serta dalam proses pembangunan pariwisata, dengan alasan bahwa masyarakat pada umumnya belum memiliki pendidikan memadai serta keterampilan yang rendah terhadap kepariwisataan, sehingga masyarakat tidak perlu ikut serta, sementara masyarakat inilah yang terdekat dan bersentuhan dengan obyek-obyek wisata yang ingin dikembangkan. Oleh karena itu, perlu ada kebijakan pemerintah Kota yang dapat mendukung berbagai program pembangunan, pariwisata kota Parepare khususnya wisata alam pantai di Kecamatan Bacukiki Barat untuk lebih memberikan insentif dan dorongan untuk meningkatkan partisipasinya.

Berdasarkan atas kondisi inilah peneliti mencoba mengkaji pengaruh partisipasi masyarakat terhadap proses pembangunan kepariwisataan yang dapat menunjang perkembangan pariwisata alam pantai di Kecamatan Bacukiki

Barat dalam suatu penelitian ilmiah yang akan dituangkan kedalam tesis dengan judul **“Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Pengembangan Wisata Alam Pantai di Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare”**.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut diatas, maka rumusan permasalahan penelitian ini adalah :

1. Sejauhmana pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan/implementasi program pembangunan pada obyek pariwisata Alam pantai di Kecamatan Bacukiki Barat ?
2. Bagaimana sikap masyarakat terhadap pembangunan/pengembangan obyek pariwisata alam pantai di Kecamatan Bacukiki Barat ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauhmana :

1. Pengaruh antara partisipasi masyarakat dengan Implementasi Program Pembangunan Pariwisata alam pantai di Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare.
2. Sikap masyarakat terhadap pembangunan/pengembangan obyek pariwisata alam pantai di Kecamatan Bacukiki Barat, kota Parepare.

D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan dimanfaatkan untuk dijadikan:

- Sebagai bahan masukan bagi pemerintah Kota Parepare dalam menyusun rencana pengembangan kepariwisataan pada khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya
- Sebagai bahan masukan bagi pengembangan kurikulum perencanaan wilayah dan kota
- Sebagai bahan masukan bagi peneliti yang ingin lebih memperdalam kajiannya dalam pengembangan kepariwisataan khususnya di kota Parepare.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji perkembangan obyek pariwisata alam pantai di Kecamatan Bacukiki Barat melalui Kebijakan dan Program pembangunan kepariwisataan khususnya di kota Parepare serta mempelajari partisipasi masyarakat terhadap pembangunan kepariwisataan khususnya di lokasi penelitian (obyek wisata alam pantai di kecamatan Bacukiki Barat). Dengan penelitian ini diharapkan akan diperoleh suatu hasil yang akan menjelaskan tentang pengaruh partisipasi masyarakat terhadap implementasi program pembangunan pariwisata alam pantai di lokasi penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Partisipasi Masyarakat

1. Pengertian Partisipasi Masyarakat

Keinginan masyarakat untuk berpartisipasi terhadap suatu program pembangunan yang dilaksanakan tidak semata-mata datang dengan sendirinya, karena masyarakat tentu akan bertanya, untuk apa mereka turut berpartisipasi terhadap kegiatan atau program yang dilakukan oleh pemerintah atau setidaknya ada tujuan yang ingin mereka capai bersama dengan partisipasi, misalnya dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup mereka serta pemberdayaan masyarakat.

Kita telah mengetahui bahwa kata partisipasi telah demikian luas penggunaannya, sehingga seperti halnya kata-kata semboyan yang muluk dalam berbagai kegiatan pembangunan, maknanya menjadi agak kabur. Untuk itu perlu terlebih dahulu dilihat pengertian dari partisipasi itu sendiri. **Davis** (1962 : 427) mengatakan "*Participation is define as mental and emotional involvement of a person in a group situation wich encourages him to contribute to goals and share responsibility in them*".

Partisipasi didefinisikan sebagai keterlibatan mental dan emosional seseorang dalam situasi kelompok tertentu yang mendorongnya untuk mendukung atau menunjang tercapainya tujuan-tujuan kelompok serta ikut bertanggung jawab terhadapnya.

Menurut **Siagian** (1985:2) bahwa "*partisipasi itu ada yang bersifat aktif dan pasif. Partisipasi pasif dapat berarti bahwa dalam sikap, perilaku dan tindakannya tidak melakukan hal-hal yang mengakibatkan terhambatnya suatu kegiatan pembangunan*". Selanjutnya **Siagian** (1985:3) menjelaskan partisipasi aktif berwujud :

1. Turut memikirkan nasib sendiri dengan memanfaatkan lembaga-lembaga sosial dan politik yang ada dimasyarakat sebagai saluran aspirasinya.
2. Menunjukkan adanya kesadaran bermasyarakat dan bernegara yang tinggi dengan tidak menyerahkan penentuan nasib kepada orang lain, seperti kepada pimpinan, tokoh masyarakat, baik yang bersifat formal maupun informal.
3. Memenuhi kewajiban sebagai warga negara yang bertanggung jawab seperti membayar pajak secara jujur serta kewajiban lainnya.
4. Ketaatan kepada berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Kerelaan melakukan pengorbanan yang dituntut oleh pembangunan demi kepentingan bersama yang lebih luas dan penting.

Mengacu kepada pendapat tersebut, membuka kemungkinan bagi setiap anggota masyarakat untuk memberikan kontribusi atau sumbangan demi terwujudnya masa depan yang lebih baik.

Bahkan partisipasi merupakan hak dan kewajiban seorang warga negara untuk memberikan kontribusinya kepada pencapaian tujuan, sehingga mereka perlu diberikan kesempatan untuk ikut serta dalam pembangunan dengan menyumbangkan inisiatif dan kreativitasnya.

2. Partisipasi dalam Pengembangan Pariwisata

Agar pembangunan mencapai hasil-hasil maksimal dan berkelanjutan, banyak kalangan sepakat bahwa pendekatan partisipatoris di dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan termasuk disektor kepariwisataan adalah sangat penting untuk digunakan dalam rangka percepatan pembangunan.

Pretty dan Guijt dalam **Mikkelsen** (1999) menjelaskan hal ini bahwa: *"Pendekatan pembangunan partisipatoris harus dimulai dengan orang-orang yang paling mengetahui tentang sistem kehidupan mereka sendiri. Pendekatan ini harus menilai dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mereka, dan memberikan sarana yang perlu bagi mereka supaya dapat mengembangkan diri".*

Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, secara lengkap dikemukakan oleh **Tjokrowinoto** (1993 : 48) sebagai berikut :

1. Rakyat adalah fokus sentral dan tujuan terakhir pembangunan, partisipasi merupakan akibat logis dari dalil tersebut.
2. Partisipasi menimbulkan rasa harga diri dan kemampuan pribadi untuk dapat turut serta dalam keputusan penting yang menyangkut masyarakat.
3. Partisipasi menciptakan suatu lingkaran umpan balik informasi tentang sikap, aspirasi, kebutuhan dan kondisi daerah yang tanpa keberadaannya akan tidak terungkap. Arus informasi ini tidak dapat dihindari untuk berhasilnya pembangunan.
4. Pembangunan dilaksanakan lebih baik dimulai dari dimana rakyat berada dan dari apa yang mereka miliki.
5. Partisipasi memperluas Zone (kawasan) penerimaan proyek pembangunan.

6. Ia akan memperluas jangkauan layanan pemerintah kepada seluruh masyarakat.
7. Partisipasi menopang pembangunan.
8. Partisipasi menyediakan lingkungan yang kondusif baik bagi aktualisasi potensi manusia maupun pertumbuhan manusia.
9. Partisipasi merupakan cara yang efektif membangun kemampuan masyarakat untuk pengelolaan program pembangunan guna memenuhi kebutuhan khas daerah.
10. Terakhir tetapi tidak kalah pentingnya, partisipasi dipandang sebagai pencerminan hak-hak demokratis individu untuk dilibatkan dalam pembangunan mereka sendiri.

Partisipasi melibatkan mental dan emosi lebih banyak dari pada fisik seseorang. Partisipasi yang didorong oleh mental dan emosi disebut partisipasi otonom, sedangkan partisipasi dengan paksaan disebut mobilisasi. Partisipasi mendorong seseorang atau kelompok untuk menyumbang atau mendukung kegiatan bersama, berdasarkan kesukarelaan sehingga tumbuh rasa tanggung jawab bersama.

Pembangunan kepariwisataan pada hakekatnya merupakan upaya untuk mengembangkan dan memanfaatkan obyek dan daya tarik wisata, yang terwujud dalam bentuk antara lain kekayaan alam yang indah, keragaman flora dan fauna, kemajemukan tradisi dan budaya serta peninggalan sejarah dan purbakala. Pengembangan obyek dan daya tarik wisata tersebut apabila dipadukan dengan pengembangan usaha jasa dan sarana pariwisata, seperti; Biro perjalanan, jasa konvensi, penyediaan akomodasi dan transportasi wisata,

akan berfungsi dapat meningkatkan daya tarik bagi berkembangnya jumlah wisatawan dan mendukung pengembangan obyek dan daya tarik wisata yang baru. Hasil yang optimal dapat diperoleh apabila upaya pengembangan tersebut didukung oleh pembangunan prasarana yang memadai.

Pembangunan kepariwisataan di Indonesia dilakukan secara terpadu melalui koordinasi lintas sektoral, agar pembangunan komponen pariwisata dapat mencapai keberhasilan yang maksimal. Keberhasilan pembangunan juga tergantung dari komponen lain misalnya; obyek dan daya tarik wisata, akomodasi, transportasi, telekomunikasi, listrik, air bersih dan industri cendramata. Semuanya itu tentunya melibatkan koperasi, swasta dan masyarakat luas. Selain itu, sumber daya manusia yang merupakan pelaku utama dalam pembangunan kepariwisataan untuk ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya.

Kekuatan inti untuk menggerakkan roda pembangunan pariwisata dilakukan oleh para pelaku utama yaitu dunia usaha pariwisata, masyarakat dan pemerintah. Peran pemerintah hanyalah sebagai fasilitator atau sebagai pemicu, sedangkan swasta dan masyarakat adalah merupakan pelaku-pelaku langsung dalam kegiatan pariwisata.

Dengan melihat beberapa pendapat dari berbagai ilmuan tersebut diatas, maka Implikasi praktis dari pendekatan partisipatif dalam pembangunan ini, bahwa pembangunan harus dimulai dengan orang-orang yang mengerti dan mengetahui mengenai sistem kehidupan mereka sendiri. Pendekatan ini harus menilai dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mereka serta memberikan sarana yang perlu bagi mereka, supaya dapat mengembangkan

diri. Dengan kata lain didalam kegiatan pembangunan, baru akan berhasil apabila dimulai dari masyarakat itu sendiri dengan melibatkan seluruh partisipasi masyarakat.

Keikutsertaan masyarakat seperti yang diinginkan antara lain dengan turut menentukan arah, strategi dan kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Oleh karena itu peningkatan kemampuan dan keterampilan masyarakat perlu semakin digalakkan, agar partisipasi tidak hanya menjadi slogan di dalam kegiatan pembangunan, dimana partisipasi itu sendiri mempunyai unsur-unsur yang sangat penting yang menjadi dasar untuk berpartisipasi yaitu : Tujuan Bersama, Kontribusi, Keterlibatan Mental, Emosi dan Fisik serta Tanggung Jawab. Untuk lebih jelasnya dapat diterangkan sebagai berikut :

a. Kontribusi. Memberikan kontribusi atau ikut memberikan sumbangan terhadap suatu kegiatan juga merupakan hal yang sangat diperlukan dalam partisipasi. Hal ini akan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengerahkan segala inisiatif dan kreatifitas yang dimiliki oleh masyarakat, sebagaimana dikemukakan oleh **Davis** dalam **Sastropetro** (1986) bahwa : *"Kontribusi adalah kesediaan memberi sesuatu sumbangan kepada usaha mencapai tujuan kelompok"*.

Hal yang sama, dikemukakan juga oleh **Mubyarto** dan **Kartodirdjo** (1988) menyebutkan bahwa *"Kontribusi itu adalah kesediaan masyarakat memberikan dukungan bagi berhasilnya setiap program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan diri sendiri. Dukungan masyarakat dapat berupa sumbangan pemikiran, restu, dan semangat,*

sumbangan berupa materi dan dana serta sumbangan tenaga dalam kegiatan pembangunan”.

Hal ini berarti bahwa terdapat rasa senang, kesukarelaan untuk membantu pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan. Kontribusi ini dapat berupa bantuan berupa materi ataupun dana serta berbagai sumbang saran dari pihak masyarakat. Adapun konstribusi terhadap pariwisata dalam bentuk;

- Menggiatkan usaha mandiri dan meningkatkan produktivitas untuk menunjang pengembangan industri pariwisata disetiap obyek wisata.
- Menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif bagi kesejukan, kenyamanan dan keamanan wisatawan di obyek-obyek wisata.
- Memberi konstribusi dan kerjasama dalam bentuk penyediaan tenaga (SDM) baik untuk pramu wisata, tenaga kerja maupun tenaga satuan pengamanan dari anggota masyarakat setempat. Membantu pemerintah dan lembaga terkait dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan pariwisata.

b. Keterlibatan Mental, Emosi dan Fisik. Keterlibatan masyarakat dalam partisipasi bukan hanya terletak pada. Aktifitas fisik semata, tetapi lebih berarti pada keterlibatan mental dan emosi, dimana jiwa seseorang juga ikut dilibatkan karena partisipasi sesungguhnya merupakan suatu keterlibatan mental dan perasaan, lebih dari pada semata-mata atau hanya keterlibatan secara jasmaniah. **Davis**, dalam **Sastropetro (1986)** selanjutnya menjelaskan bahwa *“Jenis keterlibatan ini dalam suatu situasi merupakan hasil dari pikiran danemosi masyarakat atau individu yang lebih bersifat psikologis”*. Keterlibatan mental, emosi dan fisik terdapat pada :

- Proses pengambilan keputusan.

kepariwisataan yang dilaksanakan. Bentuk kegiatan partisipasi masyarakat dapat disalurkan melalui kegiatan yaitu :

1. Partisipasi dalam proses perencanaan pembangunan pariwisata.
2. Partisipasi dalam proses pelaksanaan pembangunan pariwisata.
3. Partisipasi dalam proses pengawasan pembangunan pariwisata.
4. Partisipasi dalam proses Pemeliharaan pembangunan pariwisata.

Untuk melengkapi pemahaman mengenai konsep partisipasi, selain tinjauan yang berasal dari buku-buku teks, berikut ini dikemukakan hasil penelitian yang pernah dilakukan mengenai konsep partisipasi. Penelitian yang dilakukan oleh **Sarah Sambiran** dkk (1992), dari FISIP Universitas Sam Ratulangi Manado, berjudul "Studi Komparasi Partisipasi Masyarakat Berdasarkan Prakarsa Pemerintah dan Prakarsa Masyarakat" Menurut penelitian ini, partisipasi bukan hanya berasal dari pemerintah tetapi juga atas prakarsa masyarakat sendiri yang terbagi ke dalam bentuk partisipasi murni dan partisipasi semu. Mengenai hal ini oleh tim peneliti dijelaskan sebagai berikut :

"Partisipasi semu biasanya ditemukan pada proyek pembangunan yang otokrasi, yang biasanya diprakarsai oleh pemerintah. Keterlibatan masyarakat seringkali hanya karena terpaksa, sedangkan partisipasi murni biasanya ditentukan pada proyek yang diprakarsai oleh masyarakat itu sendiri".

Program dan kegiatan pembangunan pariwisata yang dilaksanakan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bukan hanya ditentukan dan dilaksanakan oleh pemerintah, akan tetapi juga ikut ditentukan dan dilakukan oleh masyarakat . Keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan ini biasa disebutkan dengan partisipasi masyarakat sebagai wujud dukungan masyarakat

terhadap berbagai program dan kegiatan pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga pembangunan inipun disebutkan sebagai pembangunan masyarakat.

Partisipasi Masyarakat dalam berbagai bentuk kegiatan haruslah ditujukan untuk mendukung keberhasilan implementasi program pembangunan termasuk sektor Pariwisata khususnya pariwisata alam pantai di Kecamatan Bacukiki Barat. Salah satu ukuran keberhasilan tercapainya suatu kebijakan adalah pada teknis operasionalnya, atau bagaimana implementasi suatu kebijakan di lapangan dan bagaimana dapat memberikan arti atau manfaat tertentu bagi masyarakat. **Mazmanian** dan **Sabatier** (dalam **Wahab**, 1997 : 65) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan pemerintah mengandung makna tertentu, yaitu : *"Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian"*.

Selanjutnya oleh **Meter** dan **Horn** (dalam **Wahab** 1997 : 79) antara lain dikemukakan bahwa :

"implementasi itu akan dipengaruhi oleh dimensi-dimensi kebijaksanaan semacam itu, dalam artian bahwa implementasi kebanyakan akan berhasil apabila perubahan yang dikehendaki relatif sedikit, sementara kesepakatan

terdapat tujuan utama dari mereka yang mempersoalkan program di lapangan relatif tinggi”.

Untuk melaksanakan kebijaksanaan ini, biasanya dirumuskan berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran dari pada kebijaksanaan tersebut. Artinya, kebijaksanaan tersebut harus didukung oleh program-program yang lebih berorientasi pada pelaksanaan kegiatan nyata sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan inilah diharapkan dukungan aktif masyarakat dalam bentuk partisipasi aktif dalam pembangunan.

Partisipasi yang lebih operasional, menurut pendapat **Soetrisno** (1995 : 207) adalah : *“kerja sama antara rakyat dan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan, yang dalam konteks ini diasumsikan bahwa rakyat mempunyai aspirasi dan nilai budaya yang perlu diakomodasikan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian suatu program pembangunan”.*

Pendapat ini lebih menekankan pada kerjasama masyarakat dengan pemerintah dalam berbagai program pembangunan serta adanya rasa kesadaran dan tanggung jawab masyarakat sendiri untuk melaksanakannya. Oleh karena itu, pengembangan inisiatif dan kreativitas dari masyarakat merupakan suatu hal yang seharusnya dilakukan. Dengan kata lain, masyarakat tidak saja sebagai obyek, melainkan sebagai sumber pembangunan. Untuk hal ini, **Mubyarto** (dalam **Ndraha**, 1990) mendefenisikan partisipasi sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri. Hal yang sama oleh **Davis** (1962) mengatakan *“participation is defined as mental and*

emotional involvement of a person in a group situation wich encourages him to group goals and share responsibility in them". Maksudnya disini bahwa partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosional seseorang dalam situasi kelompok tertentu yang mendorongnya untuk mendukung atau menunjang tercapainya tujuan-tujuan kelompok serta ikut bertanggung jawab terhadapnya.

Dari beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa unsur- unsur pokok yang harus dipenuhi dalam partisipasi antara lain adalah sebagai berikut :

1. Ada tujuan bersama yang hendak dicapai.
2. Adanya dorongan untuk menyumbang atau melibatkan diri untuk tercapainya tujuan bersama.
3. Adanya Keterlibatan masyarakat secara mental, emosi dan fisik.
4. Adanya tanggung jawab bersama demi tercapainya tujuan bersama atau kelompok.

Sehubungan dengan uraian diatas, maka sangat jelas bahwa, Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan pembangunan akan lebih baik hasilnya apabila masyarakat diikutsertakan dalam semua proses pembangunan itu sendiri, Oleh karena itu, dalam setiap kesempatan dalam merumuskan kebijaksanaan dan berbagai program untuk berbagai tahapan, hendaknya selalu memperhatikan keterlibatan masyarakat untuk selalu berpartisipasi didalamnya. Namun demikian oleh **Tjokroamidjojo** (1985) memberikan pendapatnya bahwa, "*.....partisipasi masyarakat dapat terselenggara bila rakyat merasa ikut terlibat dalam perencanaan pembangunan, pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan hasil pembangunan....* "

B. Pariwisata

Sektor kepariwisataan adalah merupakan salah satu sektor pembangunan yang relatif baru bagi perkembangan keilmuan maupun dalam kaitannya dengan proses pembangunan khususnya bagi negara yang sedang berkembang, sehingga dalam perkembangannya banyak persoalan yang dijumpai, baik dalam mendefinisikannya maupun dalam pelaksanaan sebagai salah satu sektor pembangunan yang cukup penting artinya. Oleh karena itu, banyak pandangan tentang kepariwisataan ini dan setiap orang mempunyai pandangan yang berbeda satu sama lainnya tentang pariwisata. Pada mulanya pengertian mengenai pariwisata tidak begitu jelas, karena tidak adanya konsep atau batasan yang jelas mengenai bidang dan bentuk dari pariwisata itu sendiri, namun demikian beberapa ahli yang telah melakukan kajian-kajian tentang pariwisata telah mengemukakan pendapatnya masing-masing. Menurut **Yoeti** (1996). Pariwisata adalah : *"Suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud / tujuan bukan untuk berusaha (business) atau mencari nafkah di tempat yang dikunjungi, tetapi semata-mata menikmati perjalanan tersebut untuk memenuhi kebutuhan / keinginan yang beraneka ragam"*.

Yoeti, dalam pandangannya melihat bahwa *"pariwisata ini sebagai suatu perjalanan yang direncanakan oleh seorang atau sekelompok orang dari satu tempat ketempat lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, baik itu kebutuhan jasmani maupun rohani"*. Pandangan yang pada perinsipnya sama dengan **Yoeti** ini, disampaikan oleh **Spillane** (1994) bahwa : *"Pariwisata sebagai perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain, bersifat sementara, dilakukan*

perorangan maupun kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam dan ilmu".

Dari beberapa penulis lainnya diantaranya **Darmadjati** (1992), memberikan pengertian bahwa : "*Pariwisata adalah merupakan perjalanan atau kepergian orang dari suatu tempat ketempat yang lain dan, bersifat sementara, baik itu dilakukan dilakukan perorangan maupun kelompok*".

Dengan memperhatikan pengertian tersebut diatas, maka selanjutnya dapat disimpulkan bahwa perjalanan pariwisata ini, bukanlah suatu perjalanan permanen dan selalu dilakukan oleh orang-orang atau kelompok itu saja, akan tetapi dilakukan oleh setiap orang atau kelompok yang memiliki kesempatan atau waktu untuk perjalanan itu sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian, ketenangan dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup yang dituju dalam dimensi sosial budaya, alam dan ilmu pengetahuan.

Uraian diatas memberikan gambaran bahwa ada tiga unsur pokok dalam pariwisata ini, masing-masing ; *manusia* (sebagai pelaku kegiatan pariwisata), *tempat* (lokasi dimana mereka melakukan perjalanan dan tujuan perjalanan), dan *waktu* (yang dihabiskan dalam perjalanan dan selama berdiam ditempat tujuan).

Pandit (1990), memperluas arti dari pariwisata ini dengan mengemukakan "*Peran pariwisata sebagai suatu jenis industri pariwisata yang mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cepat, menyediakan lapangan kerja dan peningkatan penghasilan, standar hidup serta menstimulasi sektor-sektor produktifitas lainnya*". Dengan demikian, maka pariwisata ini bukan hanya

sebagai suatu perjalanan yang akan memberikan kesenangan, kebahagiaan dan kegembiraan bagi pelakunya akan tetapi lebih jauh lagi pariwisata ini akan memberikan dampak kepada peningkatan pendapatan dan pembangunan.

Oleh karena itu, hakekat pariwisata dapat dirumuskan sebagai proses seluruh kegiatan wisatawan dalam perjalanan dan persinggahan sementara dengan motivasi yang beraneka ragam, dimana dalam proses tersebut akan memberikan kepuasan bagi pelakunya dan akan menimbulkan pengaruh terhadap kehidupan ekonomi, sosial-budaya, politik dan hankamnas untuk dimanfaatkan bagi kepentingan pembangunan bangsa dan negara.

Pendapat yang lain tentang pariwisata ini, disampaikan oleh **Fadeli** (1995). Yang menyatakan bahwa pariwisata adalah "*Keseluruhan kegiatan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk mengatur, mengurus dan melayani kebutuhan wisatawan*". Pendapat Karyono ini lebih menitikberatkan pariwisata itu sebagai kegiatan pelayanan terhadap orang atau kelompok orang yang menjalankan perjalanan sebagaimana dimaksud oleh **Yoeti** dan **Spillane** diatas. Penjelasan **Fadeli** ini, sebenarnya melengkapi penjelasan sebelumnya. Dia melihat bahwa pembangunan pariwisata bisa berhasil dengan adanya keterbukaan dari pihak masyarakat untuk menerima kehadiran pariwisata dengan turut serta baik secara langsung maupun tidak langsung dalam berbagai kegiatan pariwisata. Oleh karena itu dalam pembangunan pariwisata harus sedapat mungkin melibatkan masyarakat.

C. Obyek Wisata

Dari berbagai pandangan tentang Obyek wisata dijelaskan bahwa *obyek wisata* yang biasa juga disebut dengan *obyek daya tarik wisata* pada berwujudnya adalah sesuatu benda atau barang-barang mati yang sifatnya statis, baik yang diciptakan oleh manusia sebagai hasil seni dan budaya, ataupun yang muncul berupa gejala alam yang memiliki daya tarik kepada orang, kelompok atau wisatawan untuk di kunjungi agar dapat menyaksikan, mengagumi, menikmati, sehingga terpenuhi rasa kepuasannya sesuai dengan motif kunjungannya.

Obyek wisata ini dapat dilihat dari beberapa jenis obyek, masing-masing :

1. Obyek wisata alam

Menurut Undang-undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam. Sedangkan kawasan konservasi sendiri adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.

Pasal 31 dari Undang-undang No. 5 tahun 1990 menyebutkan bahwa dalam taman wisata alam dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya dan wisata alam.

Pasal 34 menyebutkan pula bahwa pengelolaan taman wisata dilaksanakan oleh Pemerintah.

Wisata alam adalah bentuk kegiatan rekreasi dan pariwisata yang memanfaatkan potensi sumberdaya alam, baik dalam keadaan alami maupun setelah ada usaha budidaya, sehingga memungkinkan wisatawan memperoleh kesegaran jasmaniah dan rohaniah, mendapatkan pengetahuan dan pengalaman serta menumbuhkan inspirasi dan cinta terhadap alam.

Menurut **Direktorat Perlindungan dan Pelestarian Alam** (1993) bahwa rekreasi alam atau wisata alam merupakan salah satu bagian dari kebutuhan hidup manusia yang khas dipenuhi untuk memberikan keseimbangan, keserasian, ketenangan dan kegairahan hidup, dimana rekreasi alam atau wisata alam adalah salah satu bentuk pemanfaatan sumberdaya alam yang berlandaskan atas prinsip kelestarian alam.

Penjelasan diatas memberikan pengertian bahwa obyek wisata alam ini adalah benda-benda yang tersedia dan terdapat di alam semesta yang dapat menarik perhatian seseorang untuk melihatnya, menikmati maupun mengunjunginya. Yang termasuk pada kelompok ini adalah:

- Iklim, misalnya cuaca cerah, panasnya pantai, hembusan angin, sinar matahari dan sejuknya alam pegunungan.
- Pemandangan alam dan bentuk lahan seperti lembah, gunung, sungai, air terjun, gua, sawah serta danau.
- Hutan, pada obyek ini biasanya digunakan untuk wisata remaja termasuk di dalamnya hutan wisata untuk perkemahan, hutan belukar untuk napak tilas dan sebagainya.

- Flora dan fauna, pada obyek wisata jenis ini banyak sekali ragam maupun jenis tumbuhan serta hewannya sehingga baik digunakan sebagai studi wisata, arena perburuan, cagar alam, taman safari, kebun binatang serta kebun raya.
- Tempat-tempat yang dianggap dapat menyehatkan, misalnya mandi di sumber air mineral, mandi air hangat, mandi belik atau umbul yang kesemuanya dianggap sebagai penyehat badan, penyembuh penyakit kulit, obat awet muda dan sebagainya.

Obyek wisata alam adalah perwujudan ciptaan manusia, tata hidup seni-budaya serta sejarah bangsa dan tempat atau keadaan alam yang mempunyai daya tarik untuk dikunjungi. Selanjutnya **Direktorat Perlindungan dan Pengawetan Alam** (1993) mengasumsikan obyek wisata adalah pembinaan terhadap kawasan beserta seluruh isinya maupun terhadap aspek pengusahaan yang meliputi kegiatan pemeliharaan dan pengawasan terhadap kawasan wisata. Obyek wisata yang mempunyai unsur fisik lingkungan berupa tumbuhan, satwa, geomorfologi, tanah, air, udara dan lain sebagainya serta suatu atribut dari lingkungan yang menurut anggapan manusia memiliki nilai tertentu seperti keindahan, keunikan, kelangkaan, kekhasan, keragaman, bentangan alam dan keutuhan.

Obyek wisata alam yang ada di Indonesia dikelompokkan menjadi dua *obyek wisata alam* yaitu *obyek wisata yang terdapat di luar kawasan konservasi* dan *obyek wisata yang terdapat di dalam kawasan konservasi* yang terdiri dari taman nasional, taman wisata, taman buru, taman laut dan taman hutan raya.

Semua kawasan ini berada di bawah tanggung-jawab Direktorat Jendral Perlindungan dan Pelestarian Alam.

Kegiatan rekreasi yang dapat dilakukan berupa lintas alam, mendaki gunung, mendayung, berenang, menyelam, ski air, menyusur sungai arus deras, berburu (di taman buru). Sedangkan obyek wisata yang terdapat di luar kawasan konservasi dikelola oleh Pemerintah Daerah, Pihak Swasta dan Perum Perhutani, salah satunya adalah Wahana Wisata.

Kelayakan sumberdaya alam merupakan potensi obyek wisata alam yang terdiri dari unsur-unsur fisik lingkungan berupa tumbuhan, satwa, geomorfologi, tanah, air, udara dan lain sebagainya, serta suatu atribut dari lingkungan yang menurut anggapan manusia memiliki nilai-nilai tertentu seperti keindahan, keunikan, kelangkaan, atau kekhasan keragaman, bentangan alam dan keutuhan.

2. Prinsip-prinsip Wisata Alam

Menurut **Undang-Undang Kepariwisata No. 10 Tahun 2009**, penyelenggaraan pariwisata dilaksanakan dengan menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan, menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal, memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan dan proporsionalitas, memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup dan memberdayakan masyarakat setempat.

Prinsip wisata yang paling berhasil mengkombinasikan sejumlah minat yang berbeda diantaranya olahraga, satwa liar, pakaian setempat, tempat bersejarah, pemandangan yang mengagumkan dan makanan. Ditambahkan pula potensi wisata alam (kawasan yang dilindungi) akan turun dengan cepat bila biaya, waktu dan ketidaknyamanan perjalanan meningkat atau bila bahaya selalu mengintai.

Fasilitas-fasilitas yang memadai diperlukan agar pengunjung dapat menikmati keindahan atau kebudayaan daerah tersebut. Penerangan disampaikan kepada pengunjung mengingat akan pentingnya keselamatan pengunjung dan kelestarian alam dan kebersihan lingkungan.

3. Motivasi pengunjung.

Kawasan yang ditunjuk sebagai obyek wisata alam harus mengandung potensi daya tarik alam baik flora, fauna beserta ekosistemnya, farmasi geologi, gejala alam. Kawasan yang demikian nantinya mampu mendukung pengembangan selanjutnya sesuai dengan fungsi dan memenuhi motivasi pengunjung.

Motivasi pengunjung pada hakekatnya akan timbul 5 kelompok kebutuhan, yaitu (1) adanya daya tarik; (2) Angkutan dan jasa kemudahan yang melancarkan perjalanan; (3) Perjalanan; (4) akomodasi; (5) Makanan dan minuman. Beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam menentukan pengembangan pariwisata adalah (1) tersedianya obyek dan atraksi wisata, yaitu segala sesuatu yang menjadi daya tarik bagi orang yang mengunjungi suatu daerah wisata, misalnya keindahan alam, hasil kebudayaan suatu bangsa, tatacara hidup suatu masyarakat, adat istiadat suatu bangsa, festival tradisional

dan upacara kenegaraan ; (2) adanya fasilitas aksesibility, yaitu sarana dan prasarana perhubungan dengan segala fasilitasnya, sehingga memungkinkan para wisatawan dapat mengunjungi suatu daerah tujuan wisata tertentu ; (3) tersedianya fasilitas amenities, yaitu sarana kepariwisataan yang dapat memberi pelayanan pada wisatawan selama dalam perjalanan wisata yang dilaksanakannya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

D. Pengembangan Wisata

Konsep pengembangan pariwisata menurut Myra P. Gunawan (1995) dibagi atas beberapa bagian yang akan diterapkan bagi pengembangan sektor pariwisata, yaitu:

- Perwilayahan yaitu perencanaan pariwisata hendaknya jangan didasarkan atas batas administrasi, namun lebih pada usaha untuk menciptakan produk wisata dengan suatu citra (image) yang jelas.
- Dispered Concentration yaitu pariwisata sebagai kegiatan yang bersiat terkonsentrasi perlu didistribusikan keberbagai wilayah dalam konsentrasi nasional, ini berarti ada konsentrasi-konsentrasi dibanyak lokasi.
- Plus Beach yaitu agar pengembangan pariwisata tidak mengandalkan pada petani.
- Menciptakan pada produk yaitu untuk melayani pasar utama Asean dan Asia Fasifik serta wisatawan Nusantara tanpa mengabaikan sumber wisatawan lainnya, melalui diversifikasi produk dan konsep pengembangan yang berkelanjutan, dengan mengandalkan keaslian alamiah.

Dalam pengembangan pariwisata haruslah memperhatikan beberapa pertimbangan antara lain;

- Pemanfaatan sumber daya alam
- Penanganan masalah dampak lingkungan
- Pertimbangan ekonomi tata ruang
- Organisasi dan struktur
- Sistem transportasi dan mesin pelayanan

Untuk itu pendekatan perencanaan pariwisata yang dianut dapat diringkas dalam sistematika pendekatan sebagai berikut:

- Peninjauan faktor eksternal.
- Peninjauan faktor internal.
- Analisa kawasan dan fungsi kegiatan pariwisata.
- Perumusan kriteria rencana.
- Penentuan dan pemilihan alternative konsep perencanaan.
- Menyusun rencana tata ruang alternatif terpilih.

E. Implementasi Kebijakan

1. Pengertian Implementasi Kebijakan

Apabila implementasi dikaitkan dengan kebijakan maka implementasi dapat dipandang sebagai pelaksanaan dan pengendalian arah tindakan sampai dicapainya hasil kebijaksanaan. Dalam proses kebijakan implementasi pada dasarnya merupakan aktivitas praktis yang dibedakan dari formulasi kebijakan yang bersifat teoritis. Menurut **Dunn** (1994:16) siklus kebijakan itu terdiri atas : "*Agenda setting, Policy formulation, Policy adoption, Policy implementation, Policy assessment*". Pada garis besarnya kegiatan-kegiatan utama dari siklus kebijakan terdiri dari perumusan, pelaksanaan dan evaluasi (**Mustopadidjaja**,

1988:25). **Hoogerwerf** (1983:157) menegaskan bahwa: "*agar suatu kebijaksanaan dapat memberikan hasil yang diharapkan, maka kebijaksanaan itu harus dilaksanakan. Adapaun dalam pelaksanaannya diperlukan tindakan-tindakan atau sarana-sarana yang dipilih disesuaikan dengan tujuan yang dipilih dan ingin direalisasikan*".

Dari pendapat di atas diperoleh gambaran bahwa implementasi dapat dipandang sebagai proses atau general proses yang dilakukan setelah tujuan ditetapkan. Kegiatan itu terletak diantara perumusan kebijaksanaan dan evaluasi kebijaksanaan. Sehubungan dengan hal ini dikemukakan oleh **Wibawa** (1994:35) bahwa: "*implementasi kebijakan mengandung logika yang top-down, maksudnya menurunkan alternatif-alternatif yang abstrak atau makro*". Dalam kaitannya dengan tindakan yang dilakukan sebagai usaha untuk merealisasikan suatu tujuan, jenis tindakannya dapat berupa : "*Regulative action dan Allocative action*" (**Dunn**, 1994:338).

Dengan demikian, dalam kaitannya dengan implementasi sebagai suatu proses kegiatan, untuk keberhasilannya diperlukan peraturan, sumber daya dan proses administratif. Adapun siapa yang melakukan tindakan-tindakan tersebut dikemukakan oleh **Van Horn** dan **Van Meter** (dalam **Wahab**, 1997:65) bahwa : "*Those action by public or private, individuals (groups) that are directed at the achievement of objectives set part in prior policy decisions*". (Implementasi kebijaksanaan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta, yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan).

Dari rumusan-rumusan di atas, dapat dikemukakan bahwa fungsi dan tujuan implementasi kebijakan publik pada prinsipnya berusaha memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah sesuatu program dirumuskan yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijakan negara, baik menyangkut usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun usaha-usaha untuk memberikan dampak tertentu.

2. Implementasi Program Pembangunan Pariwisata Alam Pantai

Pariwisata merupakan suatu gejala modernisasi yang menyentuh berbagai segi kehidupan masyarakat dan telah berkembang sebagai realitas yang berdimensi sosial, budaya, ekonomi, politik, agama, teknologi dan ekologi sehingga dapat didekati secara multidisipliner. Pariwisata juga merupakan gejala yang multi kompleks di dalam masyarakat dengan adanya objek wisata, daerah tujuan wisata, hotel, toko, souvenir, pramuwisata, travel dan restoran.

Dengan melihat bahwa jumlah orang yang berwisata mengalami peningkatan, maka dapat dikatakan bahwa pariwisata telah menjadi sebuah kebutuhan, untuk itulah pihak pemerintah yang dalam hal ini adalah pemerintah Kota Parepare juga telah mempersiapkan diri untuk menangkap berbagai peluang dari kegiatan pariwisata khususnya sektor pariwisata alam pantai serta merupakan dorongan bagi pemerintah sebagai pengambil kebijakan pembangunan dan menjadikan pariwisata alam pantai sebagai program yang diprioritaskan.

Pemerintah Kota Parepare juga menyadari bahwa pariwisata merupakan sebuah bisnis besar dengan investasi yang besar pula, oleh karenanya di tingkat

kabupaten/kota, Dinas Pariwisata kabupaten/kota yang menjadi penanggung jawab teknis operasional pembangunan pariwisata sesuai dengan kebijakan pembangunan kepariwisataan yang telah ditetapkan

Sehubungan dengan implementasi ini, dikemukakan oleh **Jones** (1994 ; 166) bahwa "*Implementation is that set of activities directed toward putting a program into effect*". Maksudnya implementasi merupakan suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program. Selanjutnya dikemukakan oleh **Jones** (1994:167) ada tiga kegiatan yang perlu dilakukan yaitu : "*Organization, Interpretation, Application*". Ketiga hal tersebut merupakan pilar atau dimensi dari implementasi . Untuk lebih jelas dapat diterangkan sebagai berikut :

a. Aspek Organisasi (Organization). Organisasi yang dimaksudkan oleh **Jones** (1994:167) adalah: "Sebagai kegiatan yang bertalian dengan pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menjadikan program berjalan. (*Organization: the establishment or rearrangement of resources, units and method for putting a program into effect*)".

Maksudnya, guna mencapai tujuan kebijakan pemerintah harus melakukan tindakan berupa sumber daya dan pengelolaan sumber daya. Hasil dari tindakan pertama dapat disebut input kebijakan, sementara tindakan yang kedua dapat disebut sebagai proses kebijakan. Di dalam proses kebijakan bukan hanya perilaku administratif yang terdapat di dalamnya, melainkan juga perilaku politis (**Dunn** 1994:339). Organisasi sebagai wadah maupun proses tidak dapat berjalan sendiri dalam menjalankan fungsinya mengimplementasikan

sebuah program, oleh karena setiap organisasi membutuhkan kerjasama dalam menggerakkan dirinya, demikian juga pada saat berinteraksi dengan pihak luar.

Tidak berlebihan kiranya apabila penekanan dalam penelitian ini terhadap pengorganisasian, bertitik tolak dari pentingnya menjadikan manusia sebagai modal terpenting bagi sebuah organisasi, ini juga merupakan salah satu pendekatan yang dilakukan dalam rangka memberdayakan masyarakat yang bermukim di daerah dekat pantai, jika dikaitkan dengan pelaksanaan program pembangunan pariwisata alam pantai, maka dukungan atau partisipasi masyarakat akan sangat menentukan, sebab akan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi tumbuhnya kekuatan masyarakat.

b. Aspek Interpretasi. Interpretasi menurut Jones (1994:167) yaitu: *"menafsirkan agar program menjadi rencana yang konkrit dan jelas serta dapat dilaksanakan. (Interpretation: the translation of program language (often contained in a statute) into acceptable and feasible plans and directives)"*.

Dalam proses implementasi, birokrasi pemerintah yang berperan sebagai organisasi pelaksana perlu menginterpretasikan program agar lebih operasional dan siap dilaksanakan. Dengan demikian interpretasi sebagai tindakan dalam implementasi akan menghasilkan kebijakan turunan yang operasional.

Oleh karena itu yang menjadi titik perhatian dalam uraian ini adalah interpretasi terhadap program pembangunan pariwisata alam pantai, sebab dengan interpretasi tersebut akan berpengaruh terhadap keefektifan implementasi dalam segala permasalahan terutama pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program. Adapun pemahaman, arahan dan petunjuk secara lengkap, tepat dan jelas terhadap pelaksanaan program merupakan hal yang

sangat diperlukan agar mampu menginterpretasikan secara tepat, apabila tidak jelas dikhawatirkan para pelaksana akan mengeluarkan kebijakan tersendiri dalam mengimplementasikan sebuah program pembangunan.

Ketidaktepatan interpretasi terhadap suatu program pembangunan, dalam hal ini mengenai program pembangunan pariwisata alam pantai merupakan persoalan yang mendasar dalam mengimplementasikan program secara efektif, sedangkan pemahaman terhadap pembangunan pariwisata alam pantai ini sangat penting terutama dalam merumuskan strategi yang relevan dalam pembangunan pariwisata alam pantai itu sendiri. Pengetahuan masyarakat tentang partisipasi dan pembangunan pariwisata alam pantai adalah faktor yang saling terkait terhadap efektifnya sebuah program.

c. Aplikasi (Application). Menurut Jones (1994:167) application adalah : *"Pelaksanaan pekerjaan yang meliputi penyediaan atau pengerahan barang dan jasa (Application: The routine provision of services, payments, or other agreed upon program objectives or instruments)"*.

Sedangkan dalam kata application diartikan sebagai *"the act of applying or laying on"* yaitu pemakaian, penerapan atau aplikasi. Dengan adanya pengerahan segala sumber daya melalui aplikasi maka diharapkan akan muncul tanggapan dari masyarakat terhadap pelaksanaan suatu program pembangunan.

Dalam kenyataannya yang memperoleh manfaat dari implementasi suatu kebijakan bukan hanya masyarakat yang berada pada lokasi pelaksanaan suatu program pembangunan tetapi mungkin juga ada kelompok masyarakat lain yang disebut *"Beneficiaries"* atau penerima waris (Dunn, 1994:338).

Apa yang dikemukakan oleh **Dunn** ini, telah terbukti pada beberapa kegiatan pembangunan yang sifatnya padat modal, sementara kegiatan pembangunan padat karya pun akan berdampak demikian apabila tenaga kerja yang dipakai umumnya dari luar lokasi kegiatan. Oleh karena itu, program dan kegiatan pembangunan obyek wisata alam pantai kecamatan Bacukiki Barat yang merupakan implementasi kebijakan pemerintah (publik), seyogyanya akan memperhatikan hal tersebut diatas, sehingga tidak terjadi suatu pembangunan yang kurang atau tidak dinikmati oleh masyarakat setempat.





B A B III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Desain Penelitian

Dengan tetap melakukan penyesuaian terhadap jenis serta sumber data yang akan dihimpun setelah melihat / mengidentifikasi kondisi dan situasi obyek wisata alam di Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare, maka teknik yang akan digunakan dalam pengumpulan data yakni ;

- Pengumpulan data Primer akan dilakukan melalui daftar pertanyaan (kusioner), dengan kriteria mudah dipahami oleh masyarakat yang diwawancarai, demikian pula dengan pewawancara.
- Pengumpulan data sekunder guna melengkapi data primer yang akan dilakukan melalui pengambilan beberapa bahan tertulis yang tersedia di daerah penelitian berupa data statistik, brosur, foto-foto, papan potensi dan lain-lain yang berkaitan dengan kepariwisataan Kota Parepare.

Desain penelitian ini adalah analitik kasualitas dari metode kuantitatif. untuk mengetahui dan mempelajari pengaruh/hubungan antar variabel, mengukur secara cermat tentang fenomena yang diteliti, memecahkan masalah dengan teori, serta menguji hipotesis yang diajukan dengan data empirik.

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kota Parepare dengan lokasi penelitian tempat obyek wisata alam pantai di Kecamatan Bacukiki Barat. Sedangkan waktu penelitian selama 4 bulan.

Latar belakang dasar pemilihan lokasi dalam penelitian ini adalah berdasarkan:

- a. Kawasan wisata alam di Bacukiki Barat adalah satu-satunya obyek wisata alam pantai yang dilengkapi dengan obyek wisata lainnya di Kota Parepare dan di sepanjang perjalanan dari Makassar ke Tanah Toraja.
- b. Lokasi obyek wisata ini terletak di teluk Parepare yang aman dari arus dan ombak besar serta dilengkapi sungai dan bukit yang melatarbelakanginya.
- c. Kecamatan Bacukiki Barat ditetapkan sebagai salah satu wilayah strategis untuk pengembangan pariwisata di Kota Parepare.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan unit atau individu dalam ruang lingkup yang akan diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang bermukim disekitar kawasan obyek wisata alam pantai Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare.

Atas pemahaman tersebut, maka populasi dalam penelitian ini adalah warga masyarakat Kecamatan Bacukiki Barat yang dipilih dari penduduk yang berumur 16 tahun ke atas, sehingga diperoleh ukuran populasi sebanyak 1.028 orang, sebagaimana tercantum pada tabel 3.1.

2. Sampel

Sampel yang akan diambil adalah sebagian dari populasi yang ingin diteliti setelah disesuaikan ciri-ciri dan keberadaannya, sehingga diharapkan mampu mewakili atau menggambarkan keberadaan populasi sebenarnya.

Berhubung karena populasinya cukup besar dengan batas yang cukup luas serta ciri populasi yang bervariasi, maka teknik penarikan sampel dilakukan secara berlapis proposional berdasarkan pekerjaan dan pendidikan dimana sampel ini terdiri dari penduduk sekitar kawasan, tokoh masyarakat dan aparat pemerintah yang kesemua sampel tersebut diyakini sangat memahami kondisi wilayah obyek wisata alam di Kecamatan Bacukiki Barat. Setelah diadakan evaluasi dan pertimbangan seperlunya, maka ditetapkanlah jumlah sampel sebanyak 150 orang atau sekitar 15% dari jumlah populasi dan selanjutnya ke 150 orang inilah yang dibagikan daftar pertanyaan dan sekaligus sebagai responden.

Jumlah sampel dan menjadi responden dalam penelitian ini adalah masyarakat yang mempunyai hubungan sehari-hari dengan obyek wisata yang diteliti dan tersebar di setiap Kelurahan dalam Kecamatan Bacukiki Barat. Dengan menarik dari populasi yang diperoleh 1.028 orang, maka sampel dan menjadi responden yang akan dipilih adalah sebanyak 150 orang yang tersebar di setiap kelurahan yang didasarkan atas persentase jumlah penduduk setiap kelurahan.

Dengan menggunakan pendekatan tersebut, maka diperoleh jumlah responden pada setiap kelurahan sebagai berikut :

Tabel 3.1: Jumlah penduduk yang diambil sebagai responden

No.	Kelurahan	Jumlah penduduk	Penduduk 16 th keatas	Populasi	Sampel
1	Bumi Harapan	5.769	3.913	171	21
2	Lumpue	6.784	4.801	175	27
3	S.Minangae	4.905	3.436	160	22
4	Cappagalung	5.583	3.763	181	26
5	Kampung Baru	4.663	3.326	167	18
6	Tiro Sompe	5.475	3.278	174	36
Total		33.179	22.517	1.028	150

D. Pengumpulan dan Analisis Data

1. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik sebagai berikut :

- a. Kuesioner, yaitu merupakan teknik pengumpulan data melalui penyebaran daftar pertanyaan (angket) kepada para responden untuk diisi. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik kuesioner dilakukan dengan metode angket tertutup. Artinya dalam kuesioner, responden tinggal memilih salah satu diantara beberapa alternatif jawaban yang disediakan.
- b. Observasi, yaitu suatu teknik pengumpulan data yang digunakan melalui pengamatan secara langsung terhadap berbagai aspek kehidupan sosial masyarakat dalam kaitannya dengan implementasi program pembangunan pariwisata alam pantai.
- c. Wawancara, dilakukan terhadap masyarakat dan aparat/petugas yang berkaitan dengan kegiatan pariwisata alam pantai di Kecamatan Bacukiki

Barat. Wawancara dilakukan untuk mengelaborasi secara lebih mendalam berbagai hal yang belum tercover oleh teknik kuesioner, observasi maupun studi kepustakaan.

- d. Studi kepustakaan dan telaahan dokumen, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan dan data tertulis berupa buku-buku, literatur, bulletin, makalah ilmiah, Undang-undang, peraturan-peraturan, data statistik, dokumentasi, arsip dan informasi tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Sesuai dengan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan instrumen pengukuran variabel I (Y) Partisipasi masyarakat yang dibagi dalam 3 (tiga) katagori masing-masing ; *Selalu terlibat, jarang terlibat dan tidak pernah terlibat*. Untuk variabel II (X) Impelementasi Pembangunan Pariwisata yang kesemuanya itu dalam berbentuk kuesioner.

Sebelum pernyataan-pernyataan digunakan dalam penelitian, pernyataan-pernyataan tersebut dicobakan dulu kepada responden yang serupa dengan responden penelitian. Percobaan ini akan digunakan untuk item analisis, yang tujuannya untuk menentukan apakah pernyataan bisa dipakai atau tidak.

2. Metode Analisis

a. Analisis Chisquare. Alat analisa yang dipergunakan untuk mengetahui seberapa jauh terdapat hubungan diantara kedua variabel nominal ialah analisa kontingensi atau disebut juga "Cross break" (W.Gulo, 1989). Statistik yang akan dipakai untuk menguji signifikansi hubungan ialah X^2 (chisquare) , sehingga analisis ini disebut juga analisis X^2 .

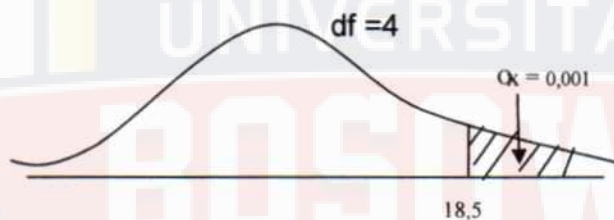
$$\chi^2 = \sum \frac{(f_o - f_e)^2}{f_e}$$

Dimana : f_o : Frekwensi hasil pengamatan
 f_e : Frekwensi yang diharapkan

Jika misalnya tingkat kebebasan : d.f. = (k-1) (b-1)
d.f. = (3-1) (3-1)
d.f. = 4

Jadi untuk $\chi^2_{0,001 ; 4}$, yaitu harga χ^2 dengan tingkat signifikan 0,001 pada tingkat kebebasan (df) = 4 menurut tabel distribusi χ^2 ialah 18,5 selanjutnya lihat gambar ;

Gambar 1 : Harga χ^2 sesuai tabel distribusi



b. Analisis variance sederhana. Metode lain yang akan dipakai adalah perhitungan statistik dari analisa variance sederhana (W. Gulo, 1989). Data yang akan dibahas hanya dua variabel dengan beberapa katagori dengan menggunakan . Hasil analisis ini akan memperlihatkan pebedaan yang berarti terhadap mean dari 2 (dua) populasi. Analisis ini juga akan menjawab parameter mean (μ) dari masing-masing populasi itu sama atau tidak. Kalau tidak sama, apakah perbedaan itu cukup signifikan atau tidak. Hipotesa nol yang akan diuji adalah : $H_0 ; \mu_1 = \mu_2 = \dots = \mu_k$ dengan hypotesis alternatifnya ialah H_1 : Mean setiap katagori tidak sama. Untuk menguji hypotesis ini, diselidiki dua macam variance yang masing-masing dipergunakan sebagai penaksir terhadap variance populasi. Yang pertama ialah rata-rata variance dari semua sampel,

disebut variance within sample (S_w^2) dan variance ini sebagai penaksir terhadap σ^2 selalu membias. Variance yang kedua, yang sebagai penaksir terhadap σ^2 tidak membias jika sampel makin besar ialah variance antar (between) sampel (S_b^2).

Apabila sampel-sampel itu berasal dari populasi yang berbeda meannya, maka S_b^2 itu lebih besar dari S_w^2 atau $S_b^2 / S_w^2 > 1$. Jadi perbandingan antara S_b^2 dengan S_w^2 itu, perbandingan mana disebut F, menentukan diterima atau tidaknya hipotesa nol. Untuk tingkat signifikan tertentu dan tingkat kebebasan (degree of freedom) yang berbeda-beda untuk S_b^2 dan S_w^2 terdapat bermacam-macam harga F seperti tertera pada tabel distribusi F pada lampiran. Dengan tabel tersebut dapat dilakukan pengujian hypotesa nol pada tingkat signifikan tertentu. Apabila harga F yang dihitung dari sampel itu lebih besar dari harga F pada tingkat signifikan tertentu yang dapat dilihat pada tabel distribusi F, maka hypotesa nol ditolak, yang berarti perbedaan mean diantara populasi-populasi dari mana sampel ditarik cukup signifikan. Sebaliknya apabila harga F yang dihitung dari sampel lebih kecil atau sama dengan harga F menurut tabel, maka hypotesis nol diterima.

E. Konsep Operasional

1. Definisi Konsep

Untuk memudahkan pemahaman tentang makna variabel yang digunakan dalam penelitian ini, maka masing-masing variabel didefinisikan sebagai berikut :

- a. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan mental dan emosional seseorang dalam situasi kelompok tertentu yang mendorongnya untuk mendukung atau menunjang tercapainya tujuan-tujuan kelompok serta ikut bertanggung jawab

terhadapnya. Sementara itu partisipasi masyarakat ini dibagi dalam 3 (tiga) kategori yaitu; partisipasi yang sifatnya selalu aktif, kurang aktif dan tidak aktif dan ketiganya ini diberi symbol penelitian Selalu Terlibat (Sl.T.), Sering Terlibat (Sr.T.) dan Tidak Terlibat (T.T.)

- b. Pengembangan (Pembangunan) wisata adalah implementasi program pembangunan wisata alam pantai di Kecamatan Bacukiki Barat yang dilaksanakan oleh pemerintah yang kegiatannya dimulai dengan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan/pemeliharaan.

2. Operasionalisasi Variabel

Untuk mengukur variabel penelitian, maka masing-masing variabel yang digunakan dioperasionalkan sebagaimana pada tabel berikut ini:

Tabel 3.3 : Operasionalisasi Variabel Penelitian

VARIABEL	DIMENSI	INDIKATOR
1	2	3
Partisipasi Masyarakat	Keterlibatan dalam Perencanaan Pembangunan Kepariwisata	1. Selalu terlibat 2. Jarang terlibat 3. Tidak terlibat
	Keterlibatan dalam Pelaksanaan Pembangunan Kepariwisata	1. Selalu terlibat 2. Jarang terlibat 3. Tidak terlibat
	Keterlibatan dalam pengawasan/pemeliharaan	1. Selalu terlibat 2. Jarang terlibat 3. Tidak terlibat
Implementasi Program Pembangunan Pariwisata	Perencanaan Program Pembangunan pariwisata	1. Tersusunnya rencana / program kegiatan yang jelas. 2. Ikut melibatkan masyarakat
	Pelaksanaan Program Pembangunan kepariwisataan	1. Melaksanakan Kegiatan sesuai rencana 2. Ikut melibatkan masyarakat
	Pengawasan/ pemeliharaan hasil pembangunan	1. Monitori & evaluasi pelaksanaan 2. Melibatkan masyarakat

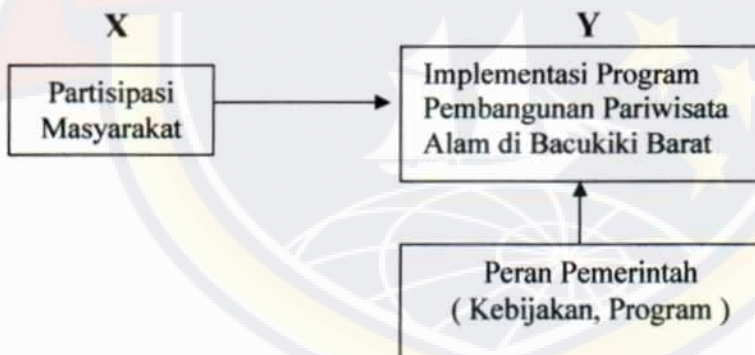
3. Variabel Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan bentuk hubungan fungsional dua variabel, yaitu **Variabel bebas (X)** dalam hal ini adalah Partisipasi Masyarakat yang berfungsi terhadap **Variabel tergantung (Y)** yakni Implementasi Program Pembangunan Pariwisata Alam di Kecamatan Bacukiki Barat.

Hubungan fungsional dua Variabel penelitian sebagaimana disebutkan di atas memiliki hubungan yang positif, dimana kedua variabel tersebut berubah pada arah yang sama. Artinya, jika variabel X berubah naik, maka variabel Y berubah naik pula. Demikian pula apabila terjadi perubahan turun.

Hubungan fungsional kedua variabel ini digambarkan sebagai berikut :

Hubungan fungsional variabel X dan Y



Skala pengukuran yang dipakai adalah skala nominal, dimana skala ini diterapkan karena dia berfungsi untuk membedakan, sementara setiap obyek (kategori dalam variable) yang diukur adalah sederajat, namun berbeda satu dengan yang lainnya. **W.Gulo (1999)**, menjelaskan bahwa menggunakan skala

nominal berarti tolak ukur yang dipakai untuk mengukur variable ini adalah indikator empirik.dari variable yang bersangkutan.

4. Kerangka Pikir





BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kota Parepare

1. Geografi, luas wilayah dan jumlah penduduk.

Kota Parepare terletak antara 3° 57' 39" - 4° 04' 49" Lintang Selatan dan 199° 36' 24" - 199° 43' 40" Bujur Timur, dibatasi oleh Kabupaten Pinrang di sebelah utara, Kabupaten Sidrap di sebelah timur, Kabupaten Barru di sebelah selatan dan Selat Makassar di sebelah barat.

Parepare dengan luas seluruhnya 99,33 Km² merupakan daerah kota terkecil di Provinsi Sulawesi Selatan, hanya (0,16% dari luas Provinsi Sulawesi Selatan). Kota Parepare sampai tahun 2007 terbagi atas 3 Kecamatan 21 Kelurahan dan mulai awal tahun 2008 dimekarkan menjadi 4 Kecamatan 22 Kelurahan (Perda No. 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan dan Perda No. 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kelurahan) dengan jumlah penduduk yang tercatat di data statistik tahun 2007 sebesar 116.309 jiwa.

Tabel 4.1: Luas Daerah, Rumah Tangga dan Penduduk tiap Kecamatan di Kota Parepare pada Tahun 2007

No	KECAMATAN	LUAS (Km ²)	RUMAH TANGGA	PENDUDUK		
				LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	BACUKIKI	79,70	11.641	23.862	24.507	48.369*
2.	UJUNG	11,30	6.620	14.466	15.215	29.681
3.	SOREANG	8,33	9.203	18.639	19.620	38.259
KOTA PAREPARE		99,33	27.464	56.967	59.342	116.309

Sumber :BPS, Hasil Survey Sosial Ekonomi Tahun 2007

*) Termasuk Bacukiki Barat 33.179 orang.

Dari luas keseluruhan yang ada 85% merupakan wilayah perbukitan dengan ketinggian yang bervariasi antara 0-500 m. Sedangkan sisanya merupakan wilayah datar yang merupakan pusat permukiman dan kegiatan perekonomian.

Dilihat dari fungsi dan peranannya, maka Kota Parepare mulai dari zaman kerajaan adalah sebagai wilayah yang sangat strategis dimana posisi pelabuhan yang terlindung oleh tanjung didepannya merupakan sasaran utama bagi pemerintah Belanda untuk menguasai dan menjadikannya suatu kota yang penting di wilayah bagian tengah Sulawesi Selatan. Di sinilah Belanda bermarkas untuk melebarkan sayapnya dan merambah seluruh dataran timur dan utara Sulawesi Selatan yang berpusat di Parepare untuk wilayah Ajatappareng.

Melihat kedudukan Kota Parepare dalam sistem daerah sekitarnya serta meneliti sejarah perkembangannya, maka Kota Parepare memiliki fungsi ganda yaitu fungsi intern (sebagai fungsi primer) dan fungsi ekstern (sebagai fungsi sekunder). Fungsi intern Kota Parepare adalah memberikan pelayanan, kemudahan-kemudahan dan penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan bagi warga kota, adapun fungsi ekstern adalah berperan sebagai pantulan dan sentuhan terhadap wilayah pengaruhnya (hinterland) yang merupakan wilayah pengembangan utama pada umumnya dan Sulawesi Selatan pada khususnya.

Perluasan wilayah Kota Parepare mengakibatkan perubahan fisik Kota Parepare, terutama perubahan tata guna lahan. Pertambahan luas wilayah memberikan peluang bagi pemerintah Kota Parepare dalam pengembangan

areal perkotaan untuk mengimbangi perkembangan penduduk dan kebutuhan ekonomi masyarakat.

Dari luas penggunaan tanah kota Parepare seluas 9.934,74 Ha, hutan adalah merupakan areal yang terbesar yakni 25,68 % (2.551,9 Ha), disusul oleh penggunaan kebun campuran 16,61 %, ladang/tegalan 12,17 %, semak belukar 11,85 %, sawah 11,75 %. Sementara itu, kawasan wisata hanya menggunakan lahan seluas 1,18 % (termasuk taman kota). Sedang untuk kawasan reklamasi tedapat seluas 0,02 Ha.

Gambar 2: Peta Administrasi Kota Parepare



2. Perekonomian

Kota Parepare adalah merupakan salah satu daerah otonom di Sulawesi Selatan, dimana struktur ekonominya terlihat didominasi oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran yaitu 28,05 % dari PDRB kota Parepare. Kemudian yang terbesar kedua adalah sektor Angkutan dan komunikasi sebesar 23,52 %, disusul oleh sektor Bank dan keuangan, sektor Bangunan dan sektor Pertanian masing-masing 12,56 % , 9,10 % dan 7,50 %. Sementara itu Jumlah pendapatan daerah kota Parepare yang dinilai dari PDRB nya adalah sebesar Rp. 1.063 milyar atas harga berlaku pada tahun 2007, sehingga pada tahun yang sama pendapatan per-kapita adalah sebesar Rp. 9,139 juta.

3. Potensi Pariwisata Kota Parepare

Berdasarkan karakteristik obyek wisata yang ada, baik fisik maupun kondisi sosial ekonomi serta kebijakan pembangunan pengembangan pariwisata dalam upaya peningkatan nilai daya tarik kumulatif, sehingga mempunyai kekuatan daya tarik untuk menarik wisatawan secara efektif dan lebih kuat maka berdasarkan hasil penelitian kawasan wisata dibagi dalam beberapa zona pengembangan obyek wisata Kota Parepare yaitu; .

1. Kawasan Utara kota yang terdapat wisata Sumur Jodoh dan Hutan Kota Jompie.
2. Kawasan Tengah dan Barat kota yang terdiri Pelabuhan Cappa Ujung, Pelabuhan Nusantara, Masjid Agung, Islamic Centre, Monumen Korban 40.000 jiwa, Monumen Patung Pemuda, Monumen Adipura, Kompleks Makam Datu La Cincing, Wisata olahraga Bahari, Taman Bermain, Taman Olahraga, Tempat Hiburan Malam, , Hotel dan Tempat Perbelanjaan.
3. Kawasan Timur Kota yang terdapat Goa Tompangnge. dan Desa Bacukiki.

4. Kawasan Selatan kota yang terdiri dari Sungai Karajae, Pantai Lumpue, Tonrangeng, dan Pantai Bibir.

Keempat kawasan pengembangan pariwisata ini merupakan kelompok-kelompok obyek wisata yang potensial pada setiap tujuan wisata di Kota Parepare. Obyek-obyek wisata ini seluruhnya berada pada kawasan kota yang lokasinya dapat dijangkau hanya dalam perhitungan menit saja. Sementara obyek-obyek wisata ini merupakan satu rangkaian perjalanan wisata kota yang sangat menyenangkan karena jarak dari pusat akomodasi perkotaan sangat dekat dan pada setiap lokasi telah tersedia sarana penunjang seperti restoran dan sebagainya.

Berikut ini akan dilihat kawasan pengembangan kepariwisataan kota Parepare :

Tabel 4.2 : Dasar Pengembangan Pariwisata menurut Kawasan Pengembangan Obyek Wisata di Kota Parepare

No	Kawasan	Arah/Karakteristik Pengembangan
1	Bagian Utara Kota Parepare - Sumur Jodoh - Hutan Kota Jompie.	- Mengembangkan dan meningkatkan tempat rekreasi serta mempromosikan obyek wisata. - Penataan Hutan Kota dan mengembangkan taman-taman rekreasi dengan tetap memperhatikan konservasi alam/lingkungan hidup.
2	Bagian Tengah/Barat Kota Parepare - Pelabuhan Nusantara dan Pelabuhan Cappa Ujung. - Masjid Agung, Monumen dan Kompleks Makam Datu' - Hotel, Tempat Hiburan dan Pusat Perbelanjaan.	- Peningkatan Pelayanan fasilitas pelabuhan sebagai pintu arus wisatawan lewat laut. - Penataan dan mempromosikan peninggalan sejarah bangsa. - Mengembangkan dan meningkatkan pelayanan jasa sebagai pusat perdagangan dengan memanfaatkan letak strategis untuk mengembangkan kewirausahaan.
3	Bagian Timur Kota Parepare - Goa Tompangnge	- Mengembangkan dan meningkatkan promosi serta peningkatan pemeliharaan obyek wisata.
4	Bagian Selatan Kota Parepare - Desa Bacukiki - Sungai Karajae, Pantai Lumpue, Tonrangeng dan Pantai Bibir.	- Memanfaatkan peninggalan sejarah dan pengembangan pusat kegiatan budaya. - Mempromosikan dan mengembangkan wisata pantai dan bahari dengan tetap memperhatikan konservasi alam /lingkungan hidup.

Sumber : Dinas Pariwisata dan Bapeda

Gambar 3 : Peta Wisata Kota Parepare



27

Sumber: Dinas Pemuda Olah Raga dan pariwisata Daerah Kota Parepare

4. Kebijakan Pengembangan Pariwisata Kota Parepare

Kebijakan Pengembangan Pariwisata Kota Parepare dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kota Parepare, dirumuskan dalam 5 (lima) bentuk kebijakan Pengembangan, yaitu:

a Pengembangan Obyek Wisata dan Infrastruktur Pendukungnya.

Kebijakan ini penting karena umumnya wisatawan yang berkunjung ke suatu daerah lebih dominan untuk liburan dengan tujuan untuk mengunjungi obyek-obyek wisata. Suatu daerah yang memiliki obyek wisata yang banyak dan menarik cenderung lebih banyak dikunjungi dan pengunjung lebih lama tinggal. Oleh karena itu, pengembangan obyek wisata dan infrastruktur pendukungnya perlu mendapat perhatian dalam rangka pengembangan industri pariwisata.

b. Pengembangan Mutu Pengusahaan Jasa dan Pelayanan Sarana

Wisata. Kebijakan ini penting karena dampak langsung yang paling besar dari adanya kunjungan wisatawan diperoleh oleh industri perhotelan dan restoran. Sedangkan industri pariwisata lainnya biasanya memperoleh dampak langsung lebih rendah dibandingkan dengan industri perhotelan dan restoran. Hal ini terjadi karena industri perhotelan dan restoran merupakan industri yang setiap saat (secara langsung) diperlukan oleh wisatawan yang berkunjung ke suatu tempat, khususnya mereka yang akan tinggal sehari atau lebih.

c. Pengembangan Penyelenggaraan Promosi dan Pemasaran

Pariwisata. Kebijakan ini penting karena melalui pengembangan promosi dan pemasaran industri pariwisata, arus kunjungan wisatawan baik wisatawan mancanegara, domestik maupun wisatawan lokal dapat meningkat. Kunjungan wisatawan ke suatu daerah akan memberi keuntungan bagi daerah tersebut, baik berupa peningkatan produksi, pendapatan, perluasan lapangan kerja, penerimaan pemerintah, dan sebagainya. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke suatu daerah dapat memberikan dampak negatif bagi daerah tersebut.

d. Pengembangan Usaha Penggalian dan Pelestarian Nilai-Nilai Kebudayaan. Kebijakan ini penting karena salah satu upaya untuk mengantisipasi adanya dampak negatif dari berkembangnya industri pariwisata berupa hilangnya nilai-nilai budaya lokal, dan adanya persepsi masyarakat bahwa industri pariwisata identik dengan *"sun, sand and sex"* adalah melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya lokal. Oleh karena itu, keunikan seni dan budaya perlu dikemas menjadi produk-produk wisata yang menarik sehingga berdampak positif bagi turis maupun masyarakat baik dari aspek ekonomi, sosial maupun budaya.

e. Pengembangan Kemampuan Aparat dan Kesadaran Masyarakat dalam Pengelolaan Pariwisata. Kebijakan ini penting karena sumberdaya manusia (SDM) pengelola pariwisata baik SDM pemerintah maupun SDM masyarakat berperan penting dalam pengembangan pariwisata di suatu daerah. Peran pemerintah misalnya diperlukan dalam menjamin stabilitas dan keamanan, kebersihan, daya saing industri pariwisata, serta penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi investasi di sektor pariwisata. Demikian halnya dengan peranan masyarakat penting terutama dalam kesadaran dan kepedulian dalam kegiatan keparawisataan.

B. Gambaran Umum Kecamatan Bacukiki Barat

1. Letak dan Luas Wilayah

Daerah penelitian terletak antara $3^{\circ} 57' 39''$ - $4^{\circ} 04' 49''$ Lintang Selatan dan $199^{\circ} 36' 24''$ - $199^{\circ} 43' 40''$ Bujur Timur. Meliputi 6 kelurahan yaitu;

Kelurahan Bumi harapan, Cappagalung, Kampung Baru, Sumpangminangae, Tiro sompe dan Lumpue. Secara administrasi berbatasan dengan :

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Barru

Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Ujung

Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar

Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bacukiki

Kecamatan Bacukiki Barat terbentuk berdasarkan Perda No. 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan dan Perda No. 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kelurahan sehingga pada awal tahun 2008 resmi menjadi Kecamatan Bacukiki barat dengan luas wilayah 13,00 Km² atau 13% dari keseluruhan luas wilayah Kota Parepare dengan jarak tempuh dari ibukota Kabupaten/Kota ± 4 Km. Lihat pada tabel 4.3

Tabel 4.3

Luas, Jarak ke Ibukota Kecamatan dan Kota menurut Kelurahan di Kecamatan Bacukiki Barat

No	KELURAHAN	LUAS (Km ²)	JARAK (Km)	
			DARI IBUKOTA KECAMATAN	DARI IBUKOTA KABUPATEN/KOTA
1	Lumpue	4,99	1,00	4,00
2	Bumi Harapan	6,16	2,00	2,00
3	SumpangMinangae	0,31	0,00	3,00
4	Cappagalung	0,70	0,50	2,00
5	Tiro Sompe	0,38	0,50	1,50
6	Kampung Baru	0,46	1,00	1,00
		13,00	-	-

Sumber : Kantor Kecamatan Bacukiki Barat

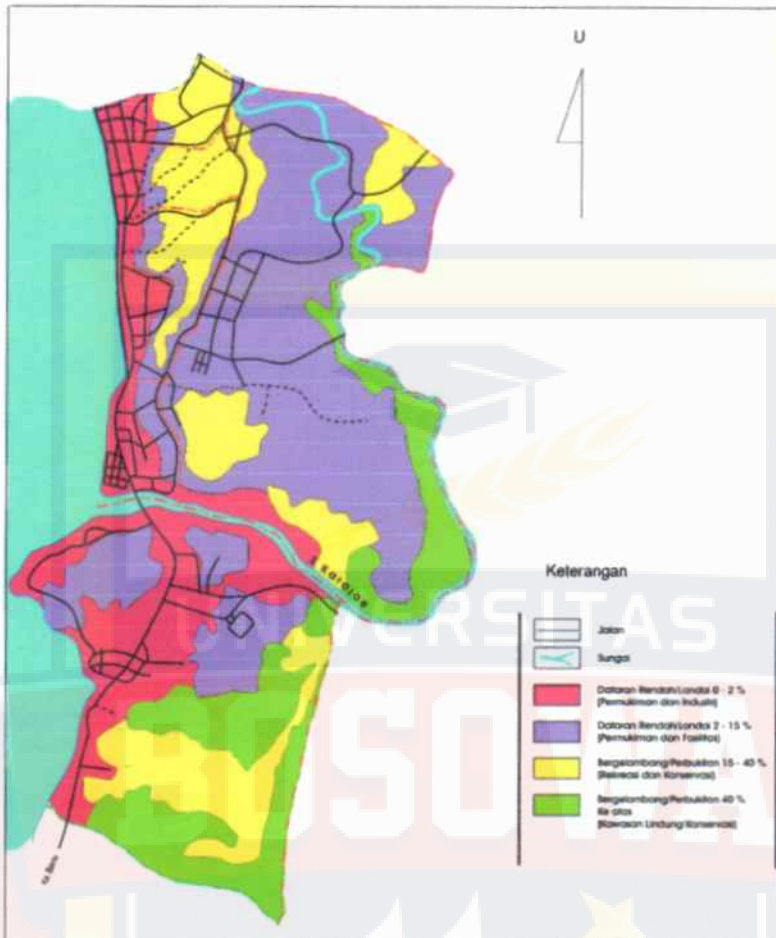
Gambar 4: Peta Administrasi Kecamatan Bacukiki Barat



2. Topografi

Kecamatan Bacukiki Barat berada pada ketinggian 0 - 100 meter di atas permukaan laut. Topografi wilayah dominan berbukit, topografi bergelombang dan perbukitan ini terletak pada bagian yang mendekati kearah pantai. Sedangkan wilayah yang rata atau landai terdapat pada bagian barat, dimana areal ini merupakan pusat kegiatan penduduk.

Gambar 5: Peta Topografi Kecamatan Bacukiki Barat



3. Keadaan Geologi dan Tanah

Formasi geologi Kecamatan Bacukiki Barat terdiri dari struktur batuan endapan alluvial, kerikil, pasir, lempung dan batu gamping koral. Selain itu terdapat juga batu gunung api seperti tufu, breksi, konglomerat, dan lava. Jenis tanah antara lain regosol, yakni tanah yang memiliki tekstur kasar dengan tanah kadar pasir yang lebih dari 60% dan memiliki solum yang dangkal serta tanah alluvial yaitu tanah endapan yang memiliki horizon yang lengkap karena kerap kali tercuci akibat erosi pada daerah kemiringan.

4. Iklim

Kondisi iklim dan cuaca Kecamatan Bacukiki barat berdasarkan catatan Stasiun Klimatologi menunjukkan tipe iklim C2 (Schmidt-Ferguson) yaitu jumlah bulan basah 5 - 6 bulan, jumlah bulan kering 2 - 3 bulan. Yang termasuk zona iklim tersebut menempati wilayah bagian barat sampai pesisir pantai. Tipe iklim D2 (Oldeman) yaitu jumlah bulan basah 3 - 4 bulan, jumlah bulan kering 2 - 3 bulan. Zona iklim tersebut menempati wilayah bagian timur. Curah hujan tertinggi adalah 556 mm/tahun dan yang terendah menunjukkan angka 0 mm/tahun atau nol hari pada bulan Agustus.

Rata-rata temperatur Kota Parepare sekitar $28,5^{\circ}\text{C}$ dengan suhu minimum $25,6^{\circ}\text{C}$ dan suhu maksimum $31,5^{\circ}\text{C}$, rata-rata kecepatan angin berkisar antara 2,5 - 5,8 m/detik yang bertiup dari arah barat ke timur selama bulan November sampai April. Kota Parepare mempunyai dua jenis musim yaitu musim hujan umumnya terjadi pada bulan November - April dan musim kemarau umumnya terjadi pada bulan Mei-Oktober setiap tahunnya, dimana kondisi tersebut juga terjadi pada daerah lain.

5. Hidrologi

Sumber air permukaan di Kecamatan Bacukiki Barat berasal dari aliran air sungai dengan sungai utama yaitu sungai Karajae yang mengalir dari arah timur ke arah barat dan beberapa sungai kecil lainnya. Sungai tersebut merupakan salah satu potensi yang dimiliki Kecamatan Bacukiki Barat dan dimanfaatkan sebagai sumber air baku untuk pengelolaan air bersih. Selain air

permukaan, sumber air yang dapat dimanfaatkan masyarakat adalah air tanah dangkal dan tanah dalam.

6. Kependudukan

Jumlah penduduk merupakan salah satu sumber daya pembangunan, dimana pertumbuhannya sangat mendukung perkembangan kegiatan terutama industri, perdagangan, jasa dan pariwisata.

Jumlah penduduk Kecamatan Bacukiki Barat pada tahun 2008 berjumlah 33.179 jiwa yang tersebar pada 6 Kelurahan, dimana penduduk berjenis kelamin perempuan lebih besar berjumlah 17.158 jiwa dibandingkan penduduk berjenis kelamin laki-laki yakni berjumlah 16.021 jiwa, seperti pada tabel berikut :

Tabel 4.4. : Jumlah penduduk Kecamatan Bacukiki Barat tahun 2008

No.	Kelurahan	Jumlah penduduk	Laki-laki	perempuan
1	Bumi Harapan	5.769	2838	2931
2	Lumpue	6.784	3324	3460
3	S.Minangae	4.905	2394	2511
4	Cappa galung	5.583	2420	3163
5	Kampung Baru	4.663	2266	2397
6	Tiro Sompe	5.475	2779	2629
Total		33.179	16.021	17.158

Sumber: Kantor Kecamatan Bacukiki Barat

7. Keadaan Sosial Ekonomi

Kecamatan Bacukki Barat adalah merupakan wilayah yang berada pada kawasan pantai atau lebih lazim disebut daerah pantai, walaupun pada bagian Timur wilayah ini berbukit dan bergunung. Wilayah Kecamatan Bacukiki Barat yang memiliki wilayah pantai terpanjang dan luas ini berada di Selat Makassar

dan Teluk Parepare. Salah satu aspek perekonomian yang saling terkait dengan pengembangan pariwisata adalah bidang industri, khususnya industri kerajinan sebagai pengrajin/pembuat perahu tradisional serta alat tangkap ikan. Selain itu penduduknya juga masih banyak hidup disektor perikanan laut/nelayan dan disamping pekerjaan-pekerjaan lainnya. Berdasarkan data PRDB Kota Parepare, pendapatan perkapita masyarakat Bacukiki Barat ini, masih lebih rendah dibanding dengan Kecamatan lainnya yakni sekitar Rp. 7,5 juta pertahun berdasarkan harga berlaku dibawah rata-rata kota Parepare.

Tabel 4.5. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No	Pekerjaan	Jumlah Penduduk	Persentase (%)
1	Pegawai PNS	4.557	14
2	TNI/POLRI	3.038	9
3	Wiraswasta	8.874	27
4	Tani	1.091	3
5	Pengrajin	4.937	15
6	Nelayan	7.255	22
7	Lainnya	3.427	10
Jumlah		33.179	100

Sumber: Kantor Kecamatan Bacukiki Barat

Dari tabel di atas terlihat bahwa penduduk yang bermata pencaharian sebagai wiraswasta lebih dominan kemudian nelayan dan, pengrajin, mereka inilah sebenarnya yang punya kaitan langsung dengan kegiatan pariwisata di lokas penelitian tetapi mereka lebih memfokuskan kepada pekerjaan utamanya daripada kegiatan yang berhubungan dengan pariwisata, walaupun mereka ikut dalam kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan pariwisata mereka melakukannya sebagai kerja sambilan, nelayan misalnya akan mempersewakan

Tabel 4.7
Jumlah fasilitas akomodasi dan hiburan tahun 2008
Di Kecamatan Bacukiki Barat

No	Kelurahan	Jenis Fasilitas			
		Hotel	Penginapan	Restauran/RM	Tempat Bermain
1	Bumi Harapan	-	-	-	-
2	Lumpue	2	-	-	-
3	S.Minangae	-	-	2	-
4	Cappa galung	1	-	-	1
5	Kampung Baru	-	1	4	-
6	Tiro Sompe	-	-	-	1
Jumlah		3	1	6	2

Sumber: Kantor Kecamatan Bacukiki Barat

10. Sarana dan Prasarana Wilayah

Secara umum kondisi di daerah obyek wisata Kecamatan Bacukki, masih kurang memadai untuk lebih jelasnya akan digambarkan sebagai berikut :

a. Jaringan Jalan. Panjang jaringan jalan di lokasi tujuan wisata bahari secara keseluruhan adalah \pm 12 Km dan jalan lingkungan sekitar 8 Km. Jaringan jalan tersebut dilihat dari kondisi sekarang pada umumnya adalah dalam keadaan baik.

b. Sarana Transportasi. Berbagai Sarana transportasi semisal bacak, taksi, ojek dan pete-pet (angkot) yang melayani penduduk maupun wisatawan dari pusat ibu kota ke lokasi tujuan wisata Kecamatan Bacukki sangat lancar dan cukup, sehingga untuk mencapai lokasi wisata dimaksud adalah tidak sulit.

c. Air Bersih. Kebutuhan air bersih penduduk di Kecamatan Bacukiki, termasuk di kawasan wisata adalah cukup terpenuhi dan menggunakan air

bersih yang dikelola oleh PDAM, hanya sebagian kecil masyarakat yang tidak tersentuh dengan jaringan air bersih PDAM. Sehingga baik untuk kebutuhan sarana penunjang.

d. Listrik. Fasilitas listrik sudah masuk ke kawasan ini, rumah-rumah penduduk, hotel dan restoran sudah memanfaatkan fasilitas ini guna memenuhi kebutuhan penerangan dan kebutuhan energi lainnya, hanya untuk lampu penerangan jalan saja yang belum sepenuhnya teredia sampai kesemua obyek wisata.

e. Telekomunikasi. Fasilitas yang sangat mendukung kelancaran arus antara lain tersedianya Jaringan telepon (satuan sambungan telekomunikasi) SST/SLJJ kelokasi wisata ini cukup memadai sehingga komunikasi dari dan ke lokasi pariwisata kecamatan Bacukiki Barat ini cukup baik.

C. Deskripsi Lokasi Penelitian Obyek Wisata Alam

1. Potensi Daya Tarik Wisata Alam Pantai di Kecamatan Bacukiki Barat

Di Kecamatan Bacukiki Barat kita bisa menemukan kondisi alam yang masih sangat bercirikan pedesaan yang juga menampilkan dua wajah, pedalaman dan pantai. Permukaan tanah di bagian timur kota berbukit-bukit yang dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, seperti peternakan, perkebunan, semak-belukar dan hutan, juga perumahan. Di bagian selatan permukaan tanah datar dengan lahan persawahan. Sementara di bagian baratnya adalah kawasan pantai dengan aktivitas nelayan. Di bagian tengah dari semua ini ke arah pantai adalah aktivitas perkotaan dengan beragam fasilitasnya.

Kondisi alam yang demikian inilah salah satu aset wisata Kota Parepare khususnya Kecamatan Bacukiki Barat. Berikut akan digambarkan sejumlah potensi wisata yang ada berkaitan dengan daya tarik alam.

a. Sungai Karajae. Sungai Karajae menyimpan potensi wisata alam sungai yang cukup mempesona. Sungai ini cukup luas dengan jalur yang membelah Kecamatan Bacukiki Barat. Potensi yang dimiliki sungai ini karena letaknya yang tidak begitu jauh dari kota dan terakses dengan kendaraan umum, serta lingkungan sekelilingnya masih sangat beralam pedesaan. Hanya saja, beberapa kegiatan masyarakat di sepanjang sungai kurang tertata sehingga menimbulkan kesan tidak teratur dan beberapa di antaranya merusak lingkungan. Padahal aktivitas masyarakat tersebut potensial juga sebagai pelengkap aktivitas wisata sungai, seperti aktivitas penangkapan ikan dan nelayan, penambang, dan sebagainya. Penataan lingkungan sekitar sungai juga masih kurang mendapat perhatian memadai.

Gambar 6 : Potensi Wisata Alam Sungai Karajae



b. Pantai Lumpue dan Tonrangeng. Obyek wisata pantai ini merupakan salah satu obyek wisata andalan Kota Parepare. Tempat ini memiliki pemandangan khas pantai tropis dengan pantai landai dengan berlatar belakang jejeran pohon kelapa dan bukit batu.

Kedua pantai ini hanya dipisahkan bukit batu. Selain pemandangan laut tropis, di sekitar pantai juga bisa dijumpai perahu-perahu tradisional khas Bugis milik masyarakat sekitar.

Pantai ini selalu ramai dikunjungi wisatawan, terutama pada hari-hari libur. Untuk menuju tempat ini dari pusat Kota Parepare tersedia banyak tumpangan umum, seperti angkutan kota yang disebut "petepete" sampai ojek.

Gambar 7: Potensi Wisata Alam Pantai Lumpue dan Tonrangeng



c. Pantai Bibir. Salah satu keunggulan sebuah kota yang terletak di pesisir adalah sisi-sisinya yang unik karena bangunan perkotaan yang berseberangan dengan pantai dan deburan ombaknya. Begitulah pula yang

dimiliki salah satu sisi Kecamatan Bacukiki Barat, karena memiliki sisi wilayah dengan pantai yang elok yang disebut Pantai Bibir. Kawasan ini terletak di bagian selatan kota.

Gambar 8 : Potensi Wisata Alam Pantai Bibir



2. Kualitas Lingkungan

Luas daerah terbangun di wilayah penelitian yang belum terlalu luas bila dibandingkan wilayah lain di Kota Parepare, menyebabkan wilayah ini belum menghadapi persoalan lingkungan yang terlampau serius seperti polusi udara, kesulitan air bersih, masalah sampah, atau kawasan kumuh yang meluas dan berat. Keseluruhan wilayahnya yang masih berkarakteristik desa dengan bangunan yang tidak terlalu padat serta lahan yang terbuka luas, sehingga cukup mempengaruhi kualitas lingkungan di wilayah Kecamatan ini.

Kualitas air tanah di lokasi penelitian juga masih cukup baik. Berdasarkan analisis kimia dan fisika dari contoh air yang diambil umumnya layak dipakai

untuk dikonsumsi rumah tangga atau untuk kegunaan lainnya. Namun demikian, tidak berarti belum ada masalah dengan pencemaran air. Umumnya penduduk memenuhi kebutuhan airnya melalui pipa yang disalurkan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) serta melalui mata air tanah. Yang banyak diperoleh melalui sumur gali.

Seperti yang dihadapi Kota Parepare, masalah limbah dan bahan buangan seperti sampah juga mendapat perhatian khusus. Hanya saja, penduduk daerah penelitian ini cukup memiliki kesadaran dalam mengatasi masalah persampahan dan kebersihan kotanya. Bukti tentang itu adalah terpilihnya Parepare sebagai salah satu kota pemenang Adipura.

Berikut adalah Peta daerah lokasi Penelitian di Kecamatan Bacukiki Barat.

Gambar 9 : Peta Lokasi Penelitian



D. Karakteristik Responden

Responden yang diambil dibagi dalam dua kelompok besar dengan karakteristik yang berbeda-beda. Kelompok *pertama* ; adalah berdasarkan tingkat pendidikan dengan karakteristik masing-masing : S-1, Akademi, SMU, SMP, SD dan tidak tamat SD. Kelompok *kedua* ; adalah berdasarkan Mata Pencaharian dengan karakteristik masing-masing : Pegawai Negeri, Petani, Wiraswasta, Ibu rumah tangga, nelayan dan Pengrajin. Kedua kelompok tersebut dapat dilihat pada tabel beriku.

Tabel 4.8
Identitas Responden berdasarkan
Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	S-1	15	3,20
2	Akademi (D-III)	30	5,77
3	SMU/SMK	45	24,36
4	SMP	35	35,26
5	SD	15	21,80
6	Tidak Tamat SD	10	9,61
Jumlah		150	100,00

Sumber : Hasil seleksi dari sampel

Tabel 4.9
Responden Berdasarkan
Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Persentase (%)
1	Pegawai Negeri	20	13
2	Petani	5	3
3	Wiraswasta	70	47
4	Ibu Rumah Tangga	10	7
5	Nelayan	20	13
6	Pengrajin	25	17
Jumlah		150	100,00

Sumber : Hasil seleksi dari sampel

E. Pengujian Hipotesis Secara Statistik

Sebagaimana dikemukakan dalam Bab III bahwa dalam rangka melakukan uji hipotesis maka akan dilakukan pengujian secara kuantitatif, dengan mempergunakan dua metode analisis statistik yakni analisis Chisquare dan analisis Variance sederhana. Pengujian Hypotesis dengan menggunakan analisis Chisquare adalah untuk mengetahui seberapa jauh terdapat *hubungan* diantara kedua variabel nominal yakni partisipasi masyarakat dengan implementasi pembangunan pariwisata di lokasi penelitian. Dengan kata lain apakah perbedaan-perbedaan proporsi Implementasi pembangunan cukup signifikan atau tidak.

Berdasarkan frekuensi jawaban responden pada lampiran 1 dan 2, setelah diadakan tabulasi maka dari hasil yang diperoleh dari responden berupa jawaban pertanyaan yang telah diberikan, diperoleh angka untuk masing-masing variabel dengan masing katagori sebagai berikut :

Tabel 4.10
Jawaban Responden Terhadap Variabel I dan Variabel II

Partisipasi Masyarakat	Partisipasi Masyarakat			jml	Persen
	Selalu Terlibat	Jarang terlibat	Tidak pernah terlibat		
Implementasi pembangunan					
Perencanaan	10	15	30	55	37
Pelaksanaan	25	20	20	65	43
Pengawasan/pemeliharaan	5	15	10	30	20
Jumlah	40	50	60	150	100

Sumber : Hasi Survey

Pada tabel ini nampak bahwa pada kegiatan *perencanaan* terdapat 37% responden yang terlibat dalam tiga kategori. Sementara pada *pelaksanaan* pembangunan terdapat 43% responden yang terlibat dalam tiga kategori partisipasi. Sedang 20% responden lainnya terlibat dalam tiga kategori partisipasi yang berkaitan dengan *pengawasan /pemeliharaan*.

Selanjutnya untuk menguji perbedaan proporsi efektifitas partisipasi dalam implementasi pembangunan pariwisata di lokasi penelitian (cukup signifikan atau tidak) diadakan pengujian dengan alat test statistik yakni Kei-Kwadrat (Chisquare) dengan notasi X^2

Cara pengujian hipotesis test ini bertitik tolak pada hipotesis nol (H_0), dimana H_0 ini suatu hipotesa yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan yang berarti dari proporsi. Bila H_0 diterima setelah diuji, berarti tidak ada hubungan antara partisipasi masyarakat sebagai variabel I dengan implementasi pembangunan pariwisata sebagai variabel II, sehingga kedua variabel itu independen (bebas).

Dengan menggunakan rumus pengujian sebagaimana yang telah dikemukakan pada Bab. III, maka selanjutnya berdasarkan tabel 4.9. tersebut diatas diperoleh angka-angka sebagai berikut :

Jumlah Responden yang berkaitan dengan perencanaan sebanyak 55 orang atau $\frac{55}{150}$ atau 37% dari jumlah responden (sampel). Sesuai dengan H_0 proporsi Responden yang selalu terlibat dalam perencanaan ini sama dengan proporsi kategori dua lainnya. Ini berarti bahwa banyaknya penduduk yang selalu berpartisipasi dalam perencanaan ialah 27% dari 40 dan banyaknya

ketergantungan antara *Partisipasi Masyarakat dengan Implementasi pembangunan pariwisata sekitar lokasi obyek wisata yang diteliti.*

Selanjutnya untuk tahap pengujian ke 2 apakah efesiensi partisipasi mempengaruhi implementasi pembangunan pariwisata pada lokasi penelitian, berikut ini akan dihitung dan dianalisis dengan alat analisis *variance sederhana* dimulai dengan perhitungan statistik F dari analisa variance dengan melihat hasil jawaban responden terhadap Implementasi pembangunan pada obyek penelitian sebagai berikut :

Tabel 4.12
Perhitungan pengaruh dua variable berdasarkan alat analisis variance sederhana

X \ Y	Y			Total
	A	B	C	
	10	15	30	
	25	20	20	
	5	15	10	
Jumlah	40	50	60	150
Banyakya katagori	3	3	3	9
Mean	40/3	50/3	60/3	150/9

Kriteria bagi uji hypotesis dgn F test , H_0 diterima jika ;

$$F \leq F_{0.05} (k-1, n-k)$$

$$K = 3 \quad n = 9$$

$$\leq F_{0,05} (2,6) \text{ lihat daftar tabel pada lampiran 7}$$

Selanjutnya besarnya nilai F dihitung dengan menentukan nilai :

TSS: Jumlah total kwadrat penyimpangan score individual terhadap grand mean. (Total Sum of Squares)

WSS: Jumlah Kwadrat penyimpangan tiap score individual terhadap mean kolomnya. (Within Sum of Squares)

BSS: Jumlah kwadrat penyimpangan mean kolom terhadap grand mean. (Between Sum of Squares)

$$\begin{aligned}
 \text{TSS} &= \sum_{ij} X_{ij}^2 - \frac{(\sum X_{ij})^2}{n} \\
 &= (10^2 + 25^2 + 5^2 + 15^2 + 20^2 + 15^2 + 30^2 + 20^2 + 10^2) - \frac{150^2}{9} \\
 &= 3.000 - 2.500 \\
 &= \mathbf{500.} \\
 \text{BSS} &= \sum \left(\frac{\sum X_{xj}}{n_{.j}} \right)^2 - \frac{(\sum \sum X_{ij})^2}{n} \\
 &= \frac{40^2}{3} + \frac{50^2}{3} + \frac{60^2}{3} - \frac{150^2}{9} \\
 &= 2.566,6 - 2.500 \\
 &= \mathbf{66,6} \\
 \text{WSS} &= \text{TSS} - \text{BSS} \\
 &= 500 - 66,6 \\
 &= \mathbf{433,4}
 \end{aligned}$$

Tabel 4.13

Perhitungan F dari tabel sebelumnya dan hasil perhitungan TBS, BBS dan WBS adalah sebagai berikut :

Sumber Variasi (1)	Variasi (2)	Tkt.Kebebasan (3)	Variance (4) = (2) : (3)	F (5)
TSS	500	8(n-1)		
BBS	66,6	2(k-1)	S ² b 33,3	$\frac{33,3}{72,2} = 0,5$
WSS	433,6	6(n-k)	S _{2w} 72,2	

Pada kasus ini, tingkat signifikan dipilih 5 % atau 0,05 dan kriteria bagi uji hipotesa dengan F test → H_0 diterima jika F hitung sama atau lebih kecil dari F tabel ($F_{0,05; (2,6)}$). → Lihat pada tabel distribusi F untuk tingkat signifikan 5 % dengan tingkat kebebasan pembilang = 2 dan tingkat kebebasan penyebut = 6 (lampiran 7).

Karena $F = 0.5$ lebih kecil dari F menurut kriteria (5,14), maka hipotesa **diterima**. Ini berarti bahwa populasi-populasi dimana sampel ditarik mempunyai mean yang sama. Dengan kata lain ke tiga jenis katagori partisipasi ini mempunyai tingkat yang sama. Perbedaan-perbedaan yang terlihat dalam sampel adalah **tidak signifikan**. Artinya tidak **ada hubungan** antara Implementasi pembangunan pariwisata pada lokasi penelitian dengan partisipasi masyarakat sekitar. Informasi ini menggambarkan pula bahwa Implementasi Program-program pembangunan pariwisata di Kecamatan Bacukiki Barat ini tidak mempunyai hubungan dengan partisipasi masyarakat, sehingga untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, maka peningkatan pembangunan obyek wisata alam di kecamatan Bacukiki Barat ini harus lebih ditingkatkan lagi. Sebaliknya partisipasi masyarakat terhadap pembangunan obyek wisata ini akan dapat di dorong melalui rangsangan program-program pembangunan yang lebih menggairahkan masyarakat. Kondisi ini harus dapat dilakukan karena saat ini terlihat bahwa hubungan antara partisipasi dengan pembangunan obyek ini belum signifikan.

Hasil pengujian statistik diatas, menunjukkan pula bahwa karena implementasi program pembangunan kepariwisataan pada obyek wisata alam pantai di Bacukiki Barat masih kurang efektif maka partisipasi masyarakatpun

masih sangat kurang. Sehingga pembangunan yang dilakukan pemerintah kota untuk kepentingan pengembangan obyek wisata alam pantai inipun tidak nampak dan bahkan terkesan tidak ada. Kondisi ini telah dibuktikan dengan uji statistik, bahwa sekarang ini hubungan antara partisipasi masyarakat dengan pembangunan obyek wisata ini tidak signifikan.

F. Hasil Kajian Empirik.

Setelah mempelajari hasil/jawaban responden berdasarkan pertanyaan yang diberikan, maka terungkap sikap-sikap masyarakat teradap keberadaan obyek wisata alam pantai di kecamatan Bacukiki Barat yang dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Sikap terhadap pembangunan obyek wisata

Dari 3 katagori menyangkut sikap yakni; setuju, kurang setuju dan tidak setuju ternyata dari 150 responden, terdapat 123 orang yang setuju terhadap pembangunan obyek pariwisata alam pantai kecamatan Bacukki Barat. Sementara terdapat 22 orang yang kurang setuju dan 5 orang yang tidak setuju. Untuk responden yang setuju terbanyak adalah pihak Wiraswasta, sementara yang terbanyak kurang setuju adalah nelayan dan terbanyak tidak setuju adalah pihak nelayan.

Tabel 4.14
Sikap Responden terhadap Pembangunan Obyek wisata

RESPONDEN	SETUJU	KURANG SETUJU	TIDAK SETUJU	JUMLAH
Pegawai Negeri	20	-	-	20
Petani	1	3	1	5
Wiraswasta	67	3	-	70
Ibu R.T	7	2	1	10
Nelayan	3	14	3	20
Pengrajin	25	-	-	25
Jumlah	123	22	5	150

Sumber : Hasil survey

2. Sikap Responden terhadap Keikutsertaannya dalam pembangunan Obyek Wisata.

Dari jawaban yang diterima, ternyata terdapat 40 orang yang menyatakan *selalu terlibat*, 50 orang menyatakan *jarang terlibat* dan 60 orang yang menyatakan *tidak terlibat*. Pada jumlah 40 orang responden yang masuk katagori *selalu terlibat* ternyata 15 orang dari pihak wiraswasta atau yang terbesar, sementara 50 orang responden yang menyatakan jarang terlibat, ternyata pihak wiraswasta terbesar yakni 32 orang. Untuk responden yang menyatakan tidak terlibat sebanyak 60 orang, pihak wiraswasta memberikan pernyataan yang terbanyak yakni 23 orang.

Tabel 4.15
Sikap Responden terhadap Keikutsertaan dalam
Pembangunan Obyek wisata

RESPONDEN	SELALU TERLIBAT	JARANG TERLIBAT	TIDAK TERLIBAT	JUMLAH
Pegawai Negeri	11	2	7	20
Petani	-	-	5	5
Wiraswasta	15	32	23	70
Ibu R.T	-	3	7	10
Nelayan	7	7	6	20
Pengrajin	7	6	12	25
Jumlah	40	50	60	150

Sumber : Hasil survey

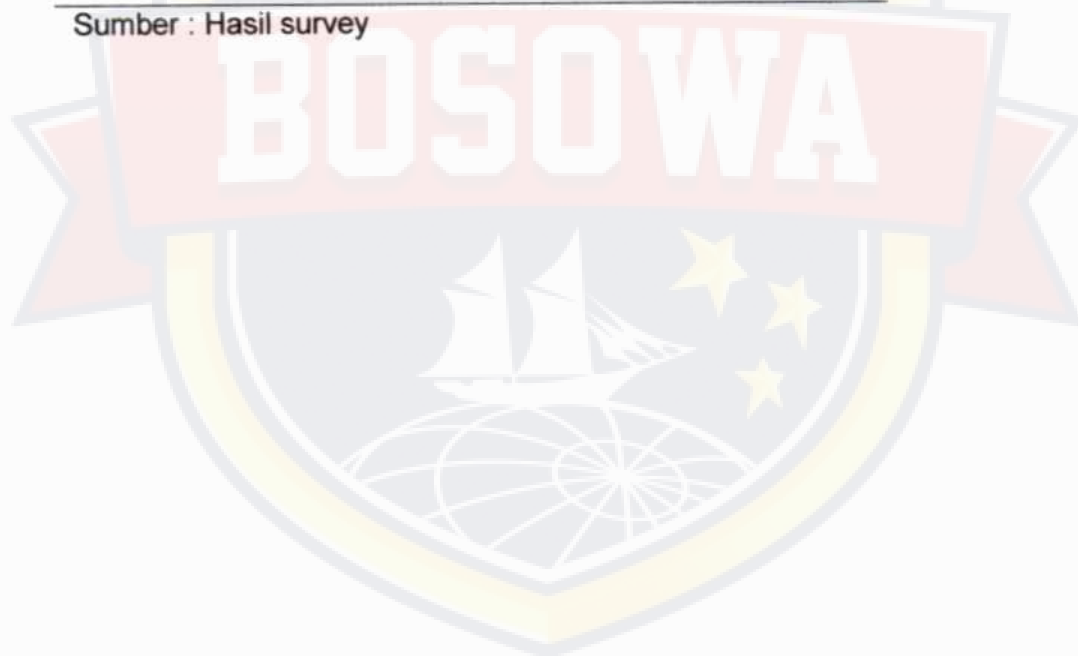
3. Sikap Responden terhadap Perkembangan Kedepan Obyek Wisata

Untuk perkembangan obyek wisata alam pantai di Kecamatan Bacukiki Barat kedepan, ternyata hampir seluruh responden menyatakan *sangat ingin* yakni 83% dari jumlah keseluruhan responden atau sebanyak 125 orang. Sementara yang menyatakan *ingin* sebanyak 23 orang atau 15% dan yang menyatakan *tidak ingin* sebanyak 2 orang nelayan atau 2%. Pernyataan terbesar sangat ingin adalah dari pihak wraswasta yakni 61 orang, kemudian disusul oleh pengrajin sebanyak 25 orang. Pihak yang menyampaikan pernyataan tidak 2 orang adalah berasal dari kalangan nelayan.

Tabel 4.16
Sikap Responden terhadap Perkembangan
Kedepan Obyek wisata

RESPONDEN	SANGAT INGIN	INGIN	TIDAK INGIN	JUMLAH
Pegawai Negeri	18	2	-	20
Petani	3	2	-	5
Wiraswasta	61	9	-	70
Ibu R.T	7	3	-	10
Nelayan	11	7	2	20
Pengrajin	25	-	-	25
Jumlah	125	23	2	150

Sumber : Hasil survey





BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Sehubungan dengan permasalahan dan tujuan penelitian ini dan setelah beberapa hal dalam bentuk analisa dan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka berikut ini dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Tidak ada pengaruh ketergantungan partisipasi masyarakat dengan implementasi program pembangunan pariwisata di Kecamatan Bacukiki Barat, Hasil kajian ini memberikan kepada kita suatu kenyataan bahwa pemerintah daerah kota Parepare belum sepenuhnya mendorong motivasi masyarakat kearah peningkatan partisipasinya terhadap pembangunan kepariwistaan di lokasi penelitian. Hal ini pula memberikan informasi bahwa masyarakat sekitar lokasi wisata belum mendapatkan manfaat terhadap keberadaan obyek wisata alam pantai di Kecamatan Bacukiki Barat ini.
2. Program dan kegiatan pembangunan pariwisata di Kecamatan Bacukiki Barat belum sepenuhnya melibatkan masyarakat dalam proses persiapan dan perencanaan dalam memberikan saran dalam menentukan jenis pembangunan pariwisata yang akan dilaksanakan, sehingga kegiatan pembangunan yang dilakukan di lokasi penelitian ini tidak sepenuhnya menyentuh pada tujuan, kebijaksanaan maupun program yang telah disusun. Akibat dari kurang terlaksananya program/kegiatan tersebut, maka

tebukti pula bahwa hubungan pembangunan yang dilakukan terhadap partisipasi masyarakat sangat lemah bahkan tidak ada.

B. S a r a n

1. Sektor Pariwisata kota Parepare khususnya di Kecamatan Bacukiki Barat ini, mempunyai perspektif yang sangat menjanjikan untuk menjadi sumber pendapatan yang besar. Terlihat banyak peluang untuk kearah itu dan peluang ini harus segera di manfaatkan dengan baik, melalui :
 - a. Penyusunan Program dan kegiatan yang lebih terarah kepada maksimalisasi fungsi obyek-obyek wisata sebagai tujuan wisata yang menyenangkan. Pemenuhan Sarana dan prasarana pokok dan penunjang perlu segera dibenahi.
 - b. Meningkatkan keterlibatan masyarakat setempat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan/pemeliharaan dengan sosialisasi program kepariwisataan dan keberadaan obyek wisata sebagai
2. Obyek-obyek wisata kota Parepare hendaknya dipaketkan dengan paket perjalanan wisata Tana Toraja dan hal ini perlu dibicarakan dengan pemerintah maupun lembaga di berbagai tingkatan. Sangat memungkinkan bahwa, wisatawan yang akan menuju atau kembali dari Tanah Toraja akan dapat meluangkan waktunya satu atau dua hari di kota Parepare.
3. Peningkatan promosi dalam dan luar negeri yang dipaketkan dengan promosi industri dan perdagangan.
4. Dalam rangka kerjasama dengan pihak swasta, sebaiknya obyek wisata Alam Pantai di Kecamatan Bacukiki Barat ini, disusun studi kelayakan



DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Abdul Wahab, Solichin, 1997**, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Davis, Keith, 1962**, *Human Relation At Work*. New York : Mc. Graw-Hill Book Company Inc.
- Dunn, William N. 1994**. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. (penerjemah, Samodra Wibawa. dkk.). Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Fandeli, Chafid, 1995**, *Dasar-dasar Manejemen Pariwisata*, Liberty Yogyakarta.
- Gunawan, P, Myra, 1995**, *Pariwisata Internasional dan Pariwisata Nusantara*, Seminar On Management of Tourism Ujung Pandang 8 Juli 1995, Kerjasama Program Pascasarjana UNHAS dengan Departemen Pos dan Telekomunikasi, Ujung Pandang.
- Hoogerwerf, A, 1983**, *Ilmu Pemerintahan*. (alih bahasa, R. L. L. Tobing). Jakarta : Departemen Luar Negeri.
- Jones, Charles, O. 1994**. *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*, penerjemah Ricky Istamto, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Mikkelsen, Britha, 1999**, *Terjemahan Nalle, Matheos, Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan Sebuah Buku Pegangan bagi Para Praktisi Lapangan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Mubyarto dan Kartadirjo, S. 1988**. *Pembangunan Pedesaan di Indonesia*, Jakarta : Liberty.
- Mustopadidjaja, AR, 1988**, *Studi Kebijaksanaan, Perkembangan dan Penerapannya Dalam Rangka Administrasi dan Manajemen Pembangunan*, FE-UI, Jakarta.
- Ndraha, Taliziduhu, 1990**. *Pembangunan Masyarakat*, Rineka, Cipta, Jakarta.
- Pendit, N.S, 1990**, *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana*. Pradnya Paramita. Jakarta.

- Sarah Sambiran dkk, 1992**, *Studi Komparsi Partisipasi Masyarakat berdasarkan Prakarsa Pemerintah dan Prakarsa Masyarakat*, FSIP Universitas Sam Ratulangi, Manado.
- Sastropoetro, S, 1988**. *Partisipasi Komunikas,. Persuasi Dan Disiplin Dalam Pembangunan Sosial*. Bandung : Alumni.
- Siagian, P, Sondang, 1995**. *Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Perubahan Sosial*, Angkasa. Bandung.
- Spillanes, James, s 1994**, *Ekonomi Pariwisata*, Kanisius, Yogyakarta.
- Soetrisno, Lukman, 1995**, *Menuju Masyarakat Partisipatif*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Tjokroamidjojo, Bintoro, 1985**, *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta : Gunung Agung.
- Tjokrowinoto, Moeljarto. 1993**. *Konsep Dan Issue Pembangunan Nasional*, Yogyakarta : UGM.
- Wibawa, samodra, 1994**. *Kebijaksanaan Publik Proses Dan Analisis*, Jakarta : Intermedia.
- W. Gulo, 1989**. *Dasar-dasar Statistika Sosial*, Satya Wacana, Semarang.
- Yoeti, A, Oka, 1996**, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Angkasa, Bandung.
- Yoeti, A, Oka, 1996**, *Pemasaran Pariwisata*, Angkasa, Bandung.

Perundang-undangan

- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990** *Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*. Ditjen PHPH, Departemen ,Kehutanan, Jakarta.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009** *Tentang Kepariwisataaan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11.

Lain-lain

Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam, Departemen Kehutanan, 1993. *Potensi Kawasan Pesisir Untuk Ekotourism di Indonesia.* Makalah Seminar Pengembangan Kawasan Pesisir Untuk Ekotourism di Indonesia Tanggal 17 September 1993. Bogor.

Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kota Parepare, *Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA),* Kota Parepare Tahun 2006.

Bappeda Kota Parepare, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Parepare 2008-2013.*

Badan Pusat Statistik Kota Parepare, *Parepare Dalam Angka 2008.*





Partisipasi Terhadap Perencanaan

No.Urt.Resp.	Sl.T	Sr.T	T.T	No.Urt.Resp.	Sl.T	Sr.T	T.T	No.Urt.Resp.	Sl.T	Sr.T	T.T
1			o	51				101			
2				52	Δ			102		*	
3		*		53				103			
4			o	54		*		104			o
5				55				105			
6		*		56			o	106	Δ		
7				57				107			
8			o	58			o	108		*	
9	Δ			59				109			
10		*		60				110			o
11				61	Δ			111			
12	Δ			62				112			
13			o	63				113			
14				64			o	114			
15			o	65		*		115			
16				66				116			o
17				67			o	117			
18			o	68				118			
19				69				119	Δ		
20		*		70	Δ			120			o
21				71				121			
22				72			o	122			
23	Δ			73				123			
24			o	74				124			o
25				75				125			
26		*		76		*		126		*	
27				77				127			
28				78				128			
29				79			o	129			
30			o	80				130			o
31	Δ			81				131			
32				82				132	Δ		
33				83				133			
34		*		84				134			
35				85			o	135			
36				86				136			
37		*		87				137			o
38				88				138			o
39				89				139			
40			o	90				140			
41				91			o	141			
42				92				142			
43		*		93			o	143			
44				94				144			
45				95			o	145			o
46				96				146			
47			o	97				147			
48				98				148			
49				99				149			
50		*		100				150			o

Partisipasi terhadap Pelaksanaan

Lanjutan

No.Urt.Resp.	SI.T	Sr.T	T.T	No.Urt.Resp.	SI.T	Sr.T	T.T	No.Urt.Resp.	SI.T	Sr.T	T.T
1				51	Δ			101	Δ		
2	Δ			52				102			
3				53		•		103			o
4				54				104			
5	Δ			55			o	105		•	
6				56				106			
7		•		57		•		107			o
8				58				108			
9				59		•		109			o
10				60		•		110			
11		•		61				111		•	
12				62		•		112	Δ		
13		•		63	*Δ			113	Δ		
14	Δ			64				114			o
15				65				115			
16	Δ			66	Δ			116			
17		•		67				117			o
18				68			o	118	Δ		
19		•		69			o	119			
20				70				120			
21	Δ			71			o	121		•	
22			o	72				122	Δ		
23				73		•		123			
24				74	Δ			124			
25		•		75			o	125			
26				76				126			
27			o	77			o	127		•	
28	Δ			78	Δ			128	Δ		
29			o	79				129			
30				80			o	130			
31				81				131			
32				82	Δ			132			
33			o	83				133	Δ		
34				84				134	Δ		
35				85				135			
36	Δ			86	Δ			136		•	
37				87				137			
38			o	88	Δ			138			
39	Δ			89				139			
40				90				140			
41				91				141			
42		•		92				142			o
43				93				143			
44				94				144			
45				95				145			
46				96		•		146			o
47				97				147			
48				98		•		148			
49				99	Δ			149		•	
50				100			o	150			

Partisipasi terhadap Pengawasan/Pemeliharaan

Lanjutan

No.Urt.Resp.	Sl.T	Sr.T	T.T	No.Urt.Resp.	Sl.T	Sr.T	T.T	No.Urt.Resp.	Sl.T	Sr.T	T.T.
1				51				101			
2				52				102			
3				53				103			
4				54				104			
5				55				105			
6				56				106			
7				57				107			
8				58				108			
9				59				109			
10				60				110			
11				61				111			
12				62				112			
13				63				113			
14				64				114			
15				65				115		.	
16				66				116			
17				67				117			
18				68				118			
19				69				119			
20				70				120			
21				71				121			
22				72				122			
23				73				123		.	o
24				74				124			o
25				75				125			o
26				76				126			
27				77				127			
28				78				128			
29				79				129			o
30				80				130			
31				81				131			o
32	Δ			82				132			
33				83	Δ			133			
34				84		.		134			
35	Δ			85				135			o
36				86				136			
37				87		.		137			
38				88				138			
39				89		.		139		.	
40				90		.		140			o
41		.		91				141	Δ		o
42				92		.		142			
43				93				143			o
44		.		94		.		144			o
45		.		95				145			
46		.		96				146			
47				97		.		147			o
48	Δ			98				148			o
49		.		99				149			
50				100				150			

Lampiran 2

No	Responden	Pere	
		SI.T	S
1	Pegawai Negeri	8	
2	Petani	-	
3	Wiraswasta	1	
4	Ibu Rumah Tangga	-	
5	Nelayan	-	
6	Pengrajin	1	
	Jumlah	10	

Keterangan.

Jumlah keseluruhan untuk SI.T= 4

Sr.T= 5

T.T = 6

Lampiran 3

**DISTRIBUSI PILIHAN RESPONDEN MENURUT NOMOR URUT
UNTUK KATAGORI PEMBANGUNAN DAN PARTISIPASI
MASYARAKAT**

KATAGORI PEMBANGUNAN	KATOGORI PARTISIPASI MASYARAKAT		
	Selalu terlibat	Jarang terlibat	Tidak terlibat
	9	3	1
	12	6	4
	23	10	8
	31	20	15
	52	26	18
	61	34	24
	70	37	30
	106	43	13
	119	50	40
	132	54	47
		65	56
		76	58
		102	64
		108	67
		126	72
			79
			85
			91
			93
			95
			104
			110
			116
			120
			124
			130
			137
			138
			145
			150
n	10	15	30

Lanjutan

KATAGORI PEMBANGUNAN	KATOGORI PARTISIPASI MASYARAKAT		
	Selalu terlibat	Jarang terlibat	Tidak terlibat
	2	7	22
	5	11	27
	14	17	29
	16	19	33
	25	25	38
	28	42	55
	36	53	68
	39	57	69
	51	59	71
	63	60	75
	66	62	77
	74	73	80
PELAKSANAAN	78	98	100
	82	96	103
	86	105	114
	88	111	107
	99	121	109
	101	127	117
	112	136	142
	113	149	146
	118		
	122		
	128		
	133		
	134		
<i>n</i>	25	20	20

Lanjutan

KATAGORI PEMBANGUNAN	KATOGORI PARTISIPASI MASYARAKAT		
	Selalu terlibat	Jarang terlibat	Tidak terlibat
PENGAWASAN / PEMELIHARAAN	22	49	123
	35	41	125
	48	44	131
	83	45	135
	141	46	129
		84	140
		87	143
		89	144
		90	147
		92	148
		94	
		97	
		115	
		139	
		97	
n	5	15	10



Lampiran 4

PEDOMAN WAWANCARA

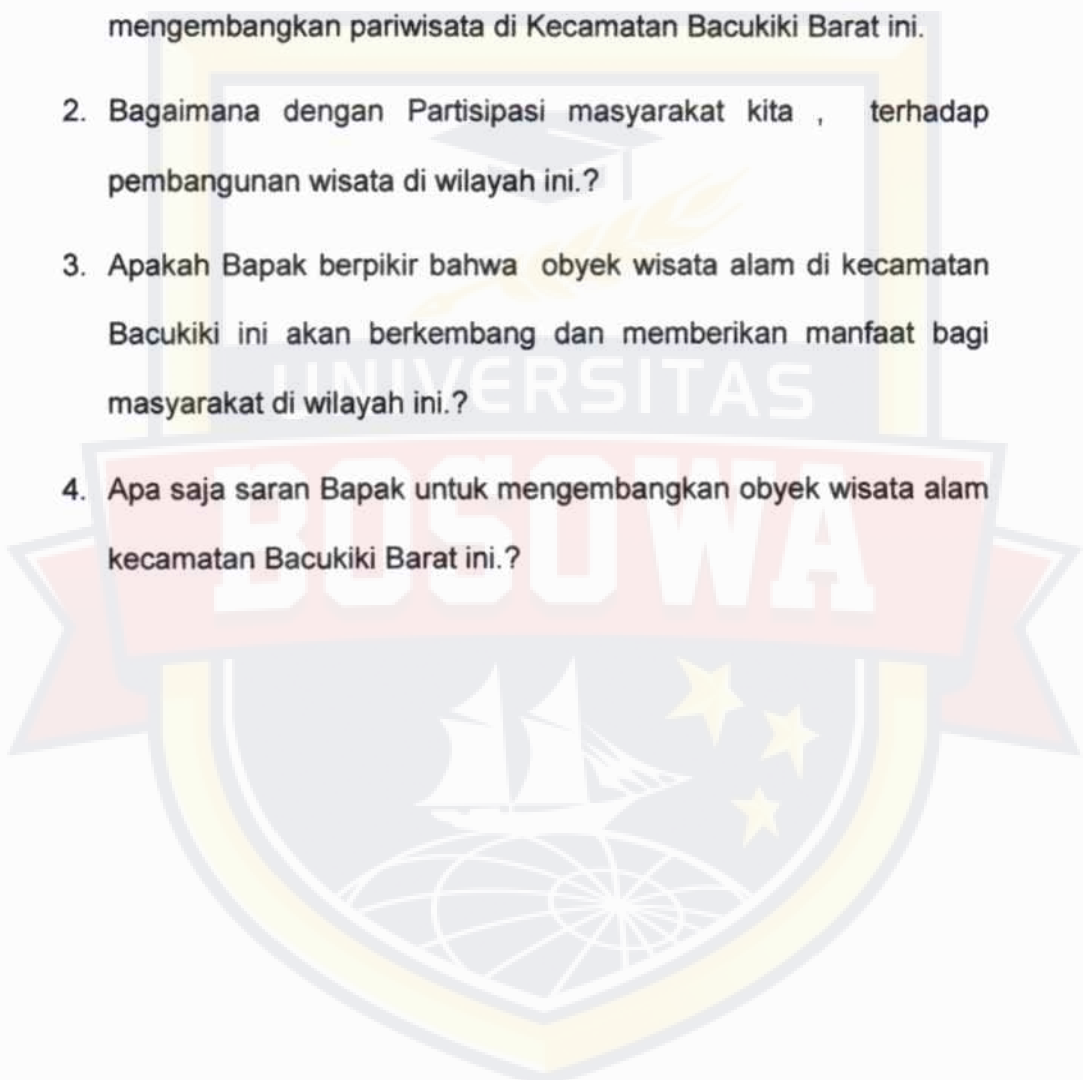
DINAS PARIWISATA

1. Untuk mengembangkan obyek pariwisata Kota Parepare, khususnya Kecamatan Bacukiki Barat.
 - a. Langkah-langkah apa saja yang Bapak akan lakukan.?
 - b. Hambatan apa saja yang dialami selama ini ?
2. Bagaimana dengan Sumber Daya Manusia yang ada di lembaga Bapak.
 - a. Langkah-langkah yang dilakukan dalam meningkatkan kinerja mereka.
 - b. Apakah perlu ada semacam tenaga ahli yang mendampingi Bapak.
3. Menyangkut dengan partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kepariwisataan ini.
 - a. Menurut Bapak ! Apakah partisipasi masyarakat sudah berarti dan sudah berpengaruh terhadap pengembangan pariwisata di wilayah ini ?
 - b. Bagaimana tingkat kesadaran mereka dalam berpartisipasi di sektor ini?
 - c. Kendala apa saja yang dihadapi dalam meningkatkan partisipasi ini.?

4. Sejauh mana Promosi yang dilakukan untuk pengembangan pariwisata ini ?

TOKOH MASYARAKAT

1. Mohon pandangan Bapak tentang upaya pemerintah kota dalam mengembangkan pariwisata di Kecamatan Bacukiki Barat ini.
2. Bagaimana dengan Partisipasi masyarakat kita , terhadap pembangunan wisata di wilayah ini.?
3. Apakah Bapak berpikir bahwa obyek wisata alam di kecamatan Bacukiki ini akan berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat di wilayah ini.?
4. Apa saja saran Bapak untuk mengembangkan obyek wisata alam kecamatan Bacukiki Barat ini.?



Lampiran 5

DAFTAR PERTANYAAN RESPONDEN

No. Urut :

1. Nama :
2. Alamat :
3. Umur :
4. Lamanya tinggal :
5. Pendidikan :
6. Pekerjaan :
7. Perkiraan rata-rata Pengeluaran sehari: Rp.
8. Bagaimana Sikap sdr terhadap pembangunan obyek wisata Alam pantai di Kecamatan Bacukiki ini :
 - a. Setuju
 - b. Kurang setuju
 - c. Tidak setuju
9. Bagaimana keikutsertaan atau partisipasi Sdr dalam pembangunan obyek wisata alam pantai di kecamatan Bacukiki Barat ini dibidang Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan/pemeliharaan.?

Mohon diberikan tanda " X " pada kotak yang dipilih dibawah ini :

	Selalu terlibat	Jarang terlibat	Tidak terlibat
Percanaan			
Pelaksanaan			
Pengawasan/ Pemeliharaan			

10. Apakah sdr ingin obyek wisata ini berkembang kedepan ? :

- a. Sangat Ingin b. Ingin c. Tidak Ingin

TERIMA KASIH

Lampiran 6

Lampiran IV
Tabel Distribusi - χ^2
Probability

df	.99	.98	.95	.90	.80	.70	.60	.50	.40	.30	.20	.10	.05	.02	.01	.001
1	0.4157	0.4528	0.0393	.0158	.0642	.148	.455	1.074	1.642	2.706	3.841	5.412	6.635	10.827		
2	.0201	.0404	.103	.211	.446	.713	1.386	2.408	3.719	4.605	5.991	7.879	9.210	13.815		
3	.116	.185	.352	.584	1.005	1.424	2.366	3.665	4.642	5.751	7.815	9.837	11.341	16.268		
4	.297	.429	.711	1.064	1.649	2.195	3.357	4.878	5.959	7.779	9.488	11.668	13.277	18.465		
5	.554	.752	1.145	1.610	2.343	3.000	4.351	6.064	7.289	9.236	11.070	13.388	15.086	20.517		
6	.872	1.134	1.625	2.204	3.070	3.828	5.345	7.231	8.558	10.645	12.592	15.033	16.812	22.457		
7	1.239	1.594	2.167	2.833	3.822	4.671	6.346	8.383	9.803	12.017	14.067	16.022	18.475	24.322		
8	1.646	2.032	2.733	3.490	4.594	5.527	7.344	9.524	11.030	13.362	15.507	17.168	20.090	26.125		
9	2.068	2.532	3.325	4.168	5.380	6.393	8.343	10.556	12.242	14.561	16.919	19.679	21.666	27.877		
10	2.558	3.059	3.940	4.865	6.179	7.267	9.342	11.781	13.442	15.987	18.307	21.161	23.209	29.588		
11	3.053	3.609	4.575	5.578	6.989	8.148	10.341	12.899	14.631	17.275	19.675	22.618	24.725	31.204		
12	3.571	4.178	5.226	6.304	7.807	9.034	11.340	14.011	15.812	18.549	21.026	24.054	26.217	32.909		
13	4.107	4.765	5.892	7.042	8.634	9.926	12.346	15.119	16.959	19.812	22.362	25.472	27.688	34.528		
14	4.660	5.368	6.571	7.790	9.467	10.821	13.339	16.222	18.151	21.064	23.685	26.873	29.141	36.123		
15	5.229	5.985	7.261	8.547	10.307	11.721	14.339	17.322	19.311	22.307	24.996	28.259	30.578	37.697		
16	5.812	6.614	7.962	9.312	11.152	12.624	15.338	18.418	20.465	23.542	26.296	29.633	32.000	39.252		
17	6.408	7.255	8.672	10.085	12.003	13.531	16.338	19.511	21.615	24.769	27.587	30.995	33.406	40.790		
18	7.015	7.908	9.390	10.865	12.857	14.440	17.335	20.601	22.760	25.989	28.569	32.346	34.805	42.312		
19	7.633	8.567	10.117	11.651	13.716	15.352	18.335	21.689	23.900	27.204	30.144	33.687	36.191	43.820		
20	8.260	9.237	10.851	12.443	14.578	16.266	19.337	22.775	25.038	28.412	31.410	35.020	37.566	45.315		
21	8.897	9.915	11.591	13.240	15.445	17.182	20.337	23.858	26.171	29.615	32.671	36.343	38.932	46.797		
22	9.542	10.600	12.338	14.041	16.314	18.101	21.337	24.939	27.301	30.813	33.924	37.659	40.289	48.268		
23	10.195	11.293	13.091	14.848	17.187	19.021	22.337	26.018	28.429	32.007	35.172	38.968	41.638	49.728		
24	10.856	11.992	13.848	15.659	18.062	19.943	23.337	27.096	29.553	33.196	36.415	40.270	42.980	51.179		
25	11.524	12.697	14.611	16.473	18.940	20.867	24.337	28.172	30.675	34.382	37.652	41.566	44.314	52.620		
26	12.198	13.409	15.379	17.292	19.820	21.792	25.336	29.248	31.795	35.563	38.885	42.856	45.647	54.052		
27	12.879	14.125	16.151	18.114	20.703	22.719	26.336	30.319	32.912	36.741	40.113	44.140	46.963	55.476		
28	13.565	14.847	16.928	18.939	21.588	23.647	27.336	31.391	34.027	37.818	41.327	45.419	48.276	56.893		
29	14.256	15.574	17.708	19.768	22.475	24.577	28.336	32.461	35.139	38.967	42.587	46.693	49.588	58.302		
30	14.953	16.306	18.493	20.599	23.364	25.508	29.336	33.530	36.250	40.256	43.773	47.962	50.892	59.702		

For larger values of df, the expression $\sqrt{2\chi^2} - \sqrt{2df - 1}$ may be used as a normal deviate with unit variance, remembering that the probability for χ^2 corresponds with that of a single tail of the normal curve. A slightly more complex transformation, which gives far better approximations for relatively small values of χ^2 , is

$$Z = (\sqrt{\chi^2} - \sqrt{2df - 1}) / \sqrt{2/df}$$

(See A. C. Acock and G. B. Stavig: "Normal Deviate Approximations of χ^2 ," *Perceptual and Motor Skills*, vol. 42, p. 220, 1976.)

Lampiran 7

Lampiran V-1

Tabel distribusi - $F_{0,05; n_1, n_2}$.

$p = .05$

$n_1 \backslash n_2$	1	2	3	4	5	6	8	12	24	∞
1	161.4	199.5	215.7	224.6	230.2	234.0	238.9	243.9	249.0	254.3
2	18.51	19.00	19.16	19.25	19.30	19.33	19.37	19.41	19.45	19.50
3	10.13	9.55	9.28	9.12	9.01	8.94	8.84	8.74	8.64	8.53
4	7.71	6.94	6.59	6.39	6.26	6.16	6.04	5.91	5.77	5.63
5	6.61	5.79	5.41	5.19	5.05	4.95	4.82	4.68	4.53	4.36
6	5.99	5.14	4.76	4.53	4.39	4.28	4.15	4.00	3.84	3.67
7	5.59	4.74	4.35	4.12	3.97	3.87	3.73	3.57	3.41	3.23
8	5.32	4.46	4.07	3.84	3.69	3.58	3.44	3.28	3.12	2.93
9	5.12	4.26	3.86	3.63	3.48	3.37	3.23	3.07	2.90	2.71
10	4.96	4.10	3.71	3.48	3.33	3.22	3.07	2.91	2.74	2.54
11	4.84	3.98	3.59	3.36	3.20	3.09	2.95	2.79	2.61	2.40
12	4.75	3.88	3.49	3.26	3.11	3.00	2.85	2.69	2.50	2.30
13	4.67	3.80	3.41	3.18	3.02	2.92	2.77	2.60	2.42	2.21
14	4.60	3.74	3.34	3.11	2.95	2.85	2.70	2.53	2.35	2.13
15	4.54	3.68	3.29	3.06	2.90	2.79	2.64	2.48	2.29	2.07
16	4.49	3.63	3.24	3.01	2.85	2.74	2.59	2.42	2.24	2.01
17	4.45	3.59	3.20	2.96	2.81	2.70	2.55	2.38	2.19	1.96
18	4.41	3.55	3.16	2.93	2.77	2.66	2.51	2.34	2.15	1.92
19	4.38	3.52	3.13	2.90	2.74	2.63	2.48	2.31	2.11	1.88
20	4.35	3.49	3.10	2.87	2.71	2.60	2.45	2.28	2.08	1.84
21	4.32	3.47	3.07	2.84	2.68	2.57	2.42	2.25	2.05	1.81
22	4.30	3.44	3.05	2.82	2.66	2.55	2.40	2.23	2.03	1.78
23	4.28	3.42	3.03	2.80	2.64	2.53	2.38	2.20	2.00	1.76
24	4.26	3.40	3.01	2.78	2.62	2.51	2.36	2.18	1.98	1.73
25	4.24	3.38	2.99	2.76	2.60	2.49	2.34	2.16	1.96	1.71
26	4.22	3.37	2.98	2.74	2.59	2.47	2.32	2.15	1.95	1.69
27	4.21	3.35	2.96	2.73	2.57	2.46	2.30	2.13	1.93	1.67
28	4.20	3.34	2.95	2.71	2.56	2.44	2.29	2.12	1.91	1.65
29	4.18	3.33	2.93	2.70	2.54	2.43	2.28	2.10	1.90	1.64
30	4.17	3.32	2.92	2.69	2.53	2.42	2.27	2.09	1.89	1.62
40	4.08	3.23	2.84	2.61	2.45	2.34	2.18	2.00	1.79	1.51
60	4.00	3.15	2.76	2.52	2.37	2.25	2.10	1.92	1.70	1.39
120	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.17	2.02	1.83	1.61	1.25
∞	3.84	2.99	2.60	2.37	2.21	2.09	1.94	1.75	1.52	1.00

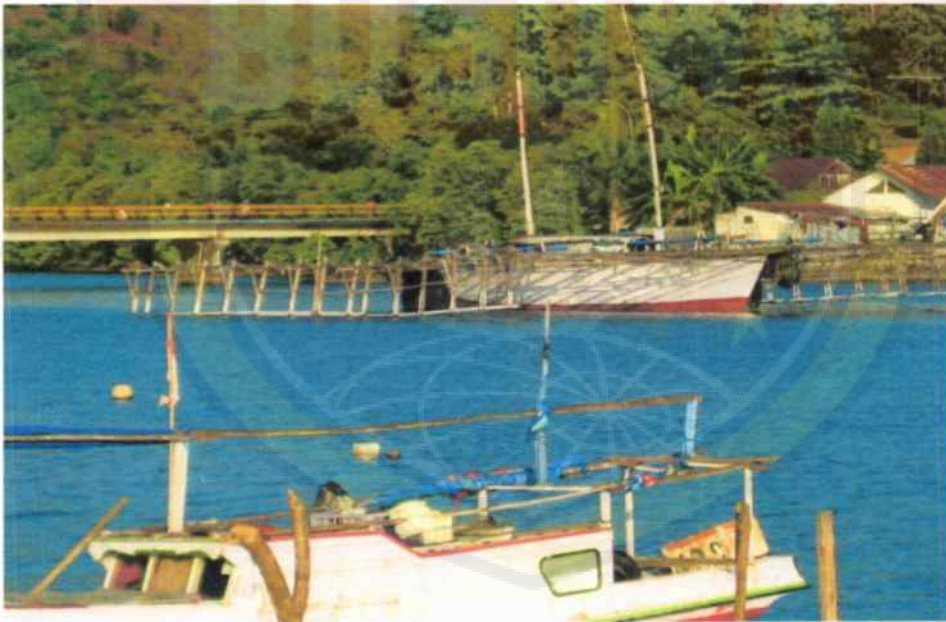
Nilai n_1 dan n_2 adalah tingkat kebebasan untuk variance penduga yang bersangkutan.

Sumber : H.M. Blalock, Jr., *op cit*, hal. 614.

Lampiran 8



Gambar Potensi Obyek Wisata Alam Pantai Bibir



Gambar Potensi Obyek Wisata Alam Sungai Karajae



Gambar Potensi Obyek Wisata Alam Pantai Tonrangeng



Gambar Potensi Obyek Wisata Alam Pantai Lumpue